

**PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS, BELANJA DAERAH
DAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI ACEH TAHUN 2012-2021**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh :

KHAIRATIL HISAN
NIM 4012018064



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS, BELANJA DAERAH
DAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI ACEH TAHUN 2012-2021**

Diajukan Oleh:

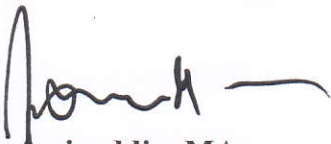
Khairatil Hisan

4012018064

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, 27 Juli 2022

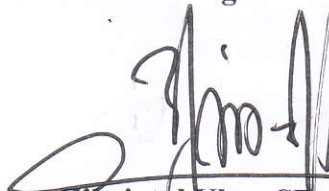
Pembimbing I



Dr. Amiruddin, MA.

NIP. 19750909 200801 1 013

Pembimbing II

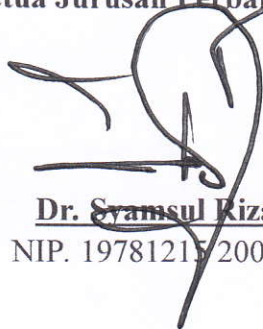


Zikriatul Ulya, SE, M.Si.

NIDN. 2024029102

Mengetahui:

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Dr. Syamsul Rizal, M.Si

NIP. 19781215 200812 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairatil Hisan
NIM : 4012018064
Tempat/tgl. Lahir : Kota Binjei/ 28 Agustus 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Makmur, Desa Meurandeh Aceh, Kecamatan
Langsa Lama, Kota Langsa

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Belanja Daerah dan Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh Tahun 2012-2021”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Khairatil Hisan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan, Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan. Maka Apabila Engkau Telah Selesai (Dari Suatu Urusan), Tetaplah Bekerja Keras (Untuk Urusan Yang Lain), Dan Hanya Kepada Tuhanmulah Engkau Berharap”

(QS. Al-Insyirah: 5-8)

“Jangan Menuntut Tuhanmu Karena Tertundanya Keinginanmu, Tapi Tuntut Dirimu Karena Menunda Adabmu Kepada Allah”

~Ibnu Atha’illah As-Sakandari~

Puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, pemahaman serta kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu Tercinta (Bapak Ishak Hs dan Ibu Nurmaida) yang tiada henti selalu memberikan do’a dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan adik-adik saya yang telah memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran yang tidak akan pernah tergantikan. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabatku dan teman-teman tercinta yang selalu memberikan motivasi dan menemani baik suka maupun duka untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana otonomi khusus, belanja daerah dan pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, dengan tahun yang di angkat yakni mulai dari tahun 2012-2021. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda, serta pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yaitu dengan mendapatkan data dari dokumen-dokumen yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: secara parsial (1) variabel dana otonomi khusus memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh dengan nilai signifikansi $0,723 > 0,05$ dan nilai dari t hitung $-0,371 < \text{nilai } t \text{ tabel } 1,8945$ (2) variabel belanja daerah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh dengan nilai signifikansi $0,317 > 0,05$ dan nilai dari t hitung $1,091 < \text{nilai } t \text{ tabel } 1,8945$. (3) variabel pembiayaan perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$ dan nilai dari t hitung $5,345 > 1,8945$. Hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwasanya nilai signifikansi F adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $34,094 > 19,35$ menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dana otonomi khusus, belanja daerah dan pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Selain itu, hasil uji *R-Square* menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi secara simultan dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu dana otonomi khusus, belanja daerah dan pembiayaan perbankan syariah sebesar 94,5% sedangkan sisanya 5,5% dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti.

Kata Kunci : Dana Otonomi Khusus, Belanja Daerah, Pembiayaan Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of special autonomy funds, regional expenditures and Islamic banking financing on economic growth in Aceh, with the selected years starting from 2012-2021. The type used in this study uses quantitative methods with multiple linear regression analysis, as well as data collection with documentation techniques, namely by obtaining data from documents sourced from the Central Statistics Agency (BPS), Aceh Financial Management Agency (BPKA) and the Financial Services Authority. (OJK). The results showed that: partially (1) the special autonomy fund variable had a negative and insignificant effect on economic growth in Aceh with a significance value of $0.723 > 0.05$ and the value of t count $-0.371 < t$ table value 1.8945 (2) The regional expenditure variable has a negative and insignificant effect on economic growth in Aceh with a significance value of $0.317 > 0.05$ and the value of t arithmetic $1.091 < t$ table value 1.8945 . (3) Islamic banking financing variable has a positive and significant effect on economic growth in Aceh with a significance value of $0.002 < 0.05$ and the value of t arithmetic $5.345 > 1.8945$. The results of the F (simultaneous) test show that the significance value of F is $0.000 < 0.05$ and the calculated F value of $34.094 > 19.35$ indicates a positive and significant effect of special autonomy funds, regional spending and Islamic banking financing on economic growth in Aceh. In addition, the results of the R -Square test show that the dependent variable, namely simultaneous economic growth, can be explained by the independent variable, namely special autonomy funds, regional expenditures and Islamic banking financing by 94.5% while the remaining 5.5% is explained by other factors outside the variable researched.

Keywords: Special Autonomy Fund, Regional Expenditure, Islamic Banking Financing and Economic Growth

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya dan dengan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. yang merupakan rahmatan Lil Alamin yang mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah, menuju zaman peradaban yang islami. Semoga jalan yang dirintis beliau tetap menjadi penerang bagi perjalanan hidup umat manusia, sehingga ia selamat dunia akhirat. Skripsi dengan judul “Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Belanja Daerah dan Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh Tahun 2012-2022”, tulisan ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, dalam penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi atas izin Allah SWT., dan bantuan serta doa dari semua pihak, maka semua kendala yang dihadapi penulis dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada:

1. Kedua orang tua (Bapak Ishak Hs dan Ibu Nurmaida) yang selalu mendoakan saya dan membesarkan saya dengan tulus dan ikhlas sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang ini.
2. Dr. H. Basri Ibrahim, MA, selaku Rektor IAIN Langsa.

3. Dr. Iskandar Budiman, M.C.L, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
4. Dr. Syamsul Rizal, M. SI selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
5. Dr. Amiruddin, MA dan Zikriatul Ulya, SE, M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar.
6. Zikriatul Ulya, SE, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasihat serta menjadi pribadi yang berkualitas.
7. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.
8. Seluruh staf akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dan memberikan informasi serta sumber referensi kepada penulis.
9. Kepada sahabatku Chairunnisak, S.E, Fatmawati, Nanda Puspita Sari, Darna Ulia Kasih, S.E dan Alya Nada Syifa, S.E, yang selalu membantu dan mendukung serta mendoakan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan terkhusus Unit 2 Perbankan Syariah angkatan 2018.
11. Kepada kakak-kakak kelas angkatan 2017 yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala keterbukaan dan ketulusan, skripsi ini penulis persembahkan dan semoga skripsi ini bermanfaat adanya, aamiin. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan tentu datangnya dari penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ilmiah yang berikutnya.

Langsa, Agustus 2022

Penulis

Khairatil Hisan

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	13
1.3 Pembatasan Masalah	14
1.4 Rumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	15
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	15
1.6 Penjelasan Istilah	16
1.7 Sistematika Penulisan	17
BAB II.....	19
KAJIAN TEORITIS.....	19
2.1 Pertumbuhan Ekonomi	19
2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	19
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto	23
2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produk Domestik Bruto	23
2.1.4 Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto	25
2.1.5 Kegunaan Data Produk Domestik Regional Bruto.....	28
2.2 Dana Otonomi Khusus.....	29
2.3 Belanja Daerah.....	30
2.3.1 Pengertian Belanja Daerah	30
2.3.2 Fungsi Belanja Daerah	33
2.3.3 Perencanaan Belanja Daerah.....	34
2.4 Pembiayaan Perbankan Syariah	36

2.4.1	Pengertian Pembiayaan	36
2.4.2	Tujuan Pembiayaan.....	37
2.4.3	Jenis Pembiayaan.....	39
2.5	Penelitian Terdahulu	43
Tabel 2.1.....		43
Kajian Terdahulu.....		43
2.6	Kerangka Teoretis.....	51
2.7	Hipotesis.....	51
BAB III.....		53
METODE PENELITIAN.....		53
3.1	Pendekatan Penelitian	53
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	53
3.3	Unit Analisis dan Horizon Waktu	53
3.3.1	Unit Analisis	53
3.3.2	Horizon Waktu.....	54
3.4	Sumber Data Penelitian.....	54
3.5	Definisi Operasional Variabel.....	55
Tabel 3.1.....		55
Definisi Operasional Variabel.....		55
3.6	Teknik Analisis Data.....	57
3.7	Metode Analisis Regresi Berganda.....	57
3.8	Uji Asumsi Klasik.....	58
3.8.1	Uji Normalitas	58
3.8.2	Uji Multikolinieritas	59
3.8.3	Uji Heteroskedastisitas	59
3.8.4	Uji Autokorelasi	60
3.9	Uji Hipotesis.....	60
3.9.1	Uji T	60
3.9.2	Uji F.....	61
3.10	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	62
BAB IV.....		63
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		63
4.1	Hasil Penelitian.....	63

4.1.1	Gambaran Umum Provinsi Aceh	63
4.1.2	Visi dan Misi Provinsi Aceh	65
4.1.3	Deskripsi Data Penelitian	66
4.1.4	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	72
4.1.5	Analisis Regresi Berganda	78
4.1.6	Hasil Uji T.....	78
4.1.7	Hasil Uji F.....	80
4.1.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	81
4.2	Pembahasan.....	82
BAB V	88
PENUTUP	88
5.1	Kesimpulan.....	88
5.2	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Aceh	3
Tabel 1.2 Dana Otonomi Daerah	6
Tabel 1.3 Jumlah Belanja Daerah	9
Tabel 1.4 Pembiayaan Perbankan Syariah	12
Tabel 2.1 Kajian Terdahulu.....	44
Tabel 3.1 Defenisi Operasional Variabel	56
Tabel 4.1 Uji Kolmogorov-Smirnov	75
Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas	76
Tabel 4.7 Uji Autokolerasi	78
Tabel 4.8 Uji Run Test	79
Tabel 4.9 Analisis Regresi Berganda	79
Tabel 4.10 Uji T	80
Tabel 4.11 Uji F	82
Tabel 4.12 Uji Koefisien Determinan (R^2)	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis	51
Gambar 4.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi	68
Gambar 4.2 Grafik Dana Otonomi Khusus.....	70
Gambar 4.3 Grafik Belanja Daerah.....	71
Gambar 4.4 Grafik Pembiayaan Perbankan Syariah.....	72
Gambar 4.5 Grafik Histogram.....	73
Gambar 4.6 Grafik Normal Probability P-Plot	74
Gambar 4.7 Grafik Scatterplot	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian.....	92
Lampiran 2 Transformasi Ln	92
Lampiran 3 Uji Normalitas	93
Lampiran 4 Uji Multikolinearitas.....	94
Lampiran 5 Uji Autokolerasi	95
Lampiran 6 Uji Heteroskedastisitas	95
Lampiran 7 Uji T.....	96
Lampiran 8 Uji F.....	96
Lampiran 9 Uji Koefisien Determinan (R^2).....	96
Lampiran 10 Hasil Regression	97
Lampiran 11 Tabel T.....	98
Lampiran 12 Tabel F.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan hal yang harus dilakukan oleh suatu negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menyediakan infrastruktur yang baik dan merata, tingkat pendidikan yang tinggi, teknologi yang semakin berinovasi dan berkembangnya perusahaan-perusahaan.¹ Pada hakekatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Paradigma perekonomian suatu daerah bisa dilihat dari pembangunan ekonomi pada daerah tersebut. Pembangunan daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan

¹ Michael P. Todaro dan Stepen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan, Jilid 1, Terjemahan Haris Munandar, Jakarta : Erlangga, 2003, h. 99

pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.²

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat ikut meningkat. Untuk melihat kinerja ekonomi suatu daerah, salah satu indikator yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi pada daerah tersebut.³ Berikut adalah data pertumbuhan ekonomi Aceh melalui PDRB atas dasar harga konstan dalam persentase pada periode tahun 2012 sampai dengan 2021.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Aceh Tahun 2012-2021

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Aceh (%)
2012	3,85
2013	2,61
2014	1,55
2015	-0,73
2016	3,29
2017	4,18

² Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Unit Percetakan dan Percetakan STIM YKPN, 2010), h. 298.

³ Ardi Hamzah, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 38 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Periode 2001-2006)*, Jurnal Balitbang Depdagri, Vol 9, No. 3, 2009.

2018	4,61
2019	4,14
2020	-0,37
2021	2,79

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (Data diolah 2022)

Berdasarkan dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh bergerak fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 diangka 3,85 persen turun pada angka 2,61 persen. Hal ini terjadi karena dampak dari belum tersedianya liquiditas dalam perekonomian Aceh, yaitu dana untuk kegiatan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBA) belum bisa dicairkan dan masih dalam proses negosiasi antara lembaga eksekutif dengan legislative, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Selain itu pada tahun 2013 tingginya tingkat inflasi di Aceh mencapai 7,31 persen sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi Aceh.

Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Aceh kembali turun mencapai angka 1,55 persen. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya seperti inflasi yang terus meningkat dari tahun sebelumnya, kinerja pertumbuhan ekonomi diperparah dengan sektor migas yang mengalami penurunan karena berakhirnya kontrak PT. Arun NGL (*Natural Gas Liquefaction*). Selain itu juga dampak dari bencana alam berupa banjir dan longsor di beberapa kabupaten dan kota.

Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Aceh turun drastic hingga minus 0,73 persen, ini disebabkan karena produksi migas setiap tahunnya mengalami penurunan drastis dikarenakan ekspor barang turun akibat tidak beroperasinya lagi PT. Arun NGL (*Natural Gas Liquefaction*). PT. Arun memberikan kontribusi besar untuk Aceh, terbukti hampir 50 persen pendapatan domestik regional brotu (PDRB) Aceh bersumber dari migas, sehingga hal ini mengganggu pertumbuhan ekonomi Aceh.

Pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2016 mulai membaik dan tumbuh pada angka 3,29 persen dan terus mengalami kenaikan sampai 4,61 persen di tahun 2018. Namun pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Aceh mengalami penurunan kembali sebesar 4,14 persen yang disebabkan karena terjadinya penurunan dari sektor industry pengolahan. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Aceh mengalami kontraksi hingga minus 0,37 persen yang dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan banyak sektor ekonomi mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Aceh kembali membaik dan tumbuh diangka 2,79 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang terus meningkat dan dinamis yang bercirikan ekonomi yang kuat dan maju sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat daerah. Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan

kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mana daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola potensi daerahnya sendiri.⁴

Aceh adalah salah satu provinsi di pulau Sumatera Indonesia yang diberikan kewenangan otonomi khusus. Pemberlakuan Aceh sebagai daerah otonomi khusus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Provinsi Aceh diberikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh untuk jangka waktu 20 tahun, dana otsus pertama sampai kelima belas adalah 2% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, kemudian pada tahun ke lima belas hingga kedua puluh adalah 1% dari plafon DAU nasional.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 183 ayat 1 mengamanatkan penggunaan Dana Otsus untuk membiayai pembangunan terutama (i) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, (ii) pemberdayaan ekonomi rakyat. (iii) pengentasan kemiskinan, (iv) serta pendanaan pendidikan, (v) sosial dan (vi) kesehatan. Sejak dianggarkan pertama kali di tahun 2008

⁴ Sirajuddin, *et. Al.*, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Setara Press, 2016), h. 256.

⁵ Sisca Mediyanti, *Analisis Dampak Penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh*, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol 7, No 1, 2019.

sampai dengan tahun 2021 total alokasi Dana Otsus yang diterima oleh Provinsi Aceh sebesar 88,43 triliun. Jumlah yang cukup besar untuk dapat melakukan akselerasi pembangunan di Aceh. Oleh karena itu, meningkatnya pengalokasian Dana Otsus maka akan menyebabkan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut perkembangan dana otonomi khusus Aceh tahun 2012-2021.

Tabel 1.2
Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2012-2021

Tahun	Dana Otonomi Khusus (Rupiah)
2012	5.476.288.764.000
2013	6.222.785.783.000
2014	6.824.386.514.000
2015	7.057.756.971.000
2016	7.707.216.942.000
2017	7.971.646.295.000
2018	8.029.791.593.000
2019	8.357.471.654.000
2020	7.555.278.348.000
2021	7.805.827.806.000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (Data diolah 2022)

Berdasarkan Tabel 1.2 dana otonomi khusus yang diterima oleh Provinsi Aceh setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya alokasi Dana Otsus diharapkan dapat mendorong pembangunan kesejahteraan rakyat dan sektor-sektor ekonomi daerah sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi tumbuh dengan baik. Namun kenyataannya Dana Otsus yang dialokasikan belum dapat mendorong perekonomian di Aceh tumbuh dengan

pesat sebagaimana pesatnya pertumbuhan Dana Otsus. Hal ini dapat dibuktikan dengan data dana otonomi khusus pada tahun 2019 sebesar Rp8.537.471.654 lebih besar dari tahun sebelumnya, namun pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2019 menurun 4,14 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya ketidak konsistenan antara dana otonomi khusus dan pertumbuhan ekonomi.

Ini dikarenakan pemanfaatan Dana Otsus belum tepat sasaran dalam pengalokasiannya terutama untuk enam bidang layanan dasar, salah satu contohnya pada bidang infrastruktur yaitu pembangunan pasar sayur yang terletak di Gampong Cunda Lhokseumawe, bangunan itu sudah dua kali direnovasi tapi tidak difungsikan oleh masyarakat, pembangunan Gedung serba guna milik Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang terbengkalai karena tidak difungsikan. Sehingga Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara terkesan terbuang sia-sia, bangunan yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat untuk mencari rezeki malah tidak berfungsi.⁶

Faktor lain yang mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang kondusif adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen

⁶ Sarina, "Menyoal Bangunan Mubazir Bernilai Miliaran Rupiah di Aceh", <http://www.ajnn.net>. Diakses tanggal 1 Agustus 2022.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk regional.

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah, maka itu analisis terhadap belanja seharusnya dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi dan koreksi. Belanja yang dilakukan pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Keynesy, menjelaskan bahwasanya pengeluaran pemerintah terhadap berbagai kegiatan pembangunan akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat.⁷

⁷ Mutiara Rizka, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pada Provinsi DKI Jakarta" (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2020), h. 5.

Perkembangan jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi Aceh menuntut adanya pengeluaran pembiayaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Apabila belanja daerah meningkat maka kebutuhan akan kepentingan daerah juga meningkat serta membuat perekonomian menjadi lebih baik.

Tabel 1.3 Jumlah Belanja Daerah Aceh Tahun 2012-2021

Tahun	Jumlah Belanja Daerah (Ribu Rupiah)
2012	8.757.319.943
2013	11.220.427.555
2014	12.045.847.341
2015	12.135.635.484
2016	12.119.713.196
2017	13.832.848.610
2018	12.306.306.187
2019	15.787.883.385
2020	15.798.122.413
2021	13.682.744.002

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (Data diolah 2022)

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 belanja daerah Aceh terus mengalami peningkatan. Namun hal menarik yang perlu kita perhatikan adalah pada perkembangan PDRB Aceh dari periode yang sama. Tingkat belanja daerah Aceh pada tahun 2012 sampai 2015 terus mengalami peningkatan, namun tingkat PDRB Aceh dari tahun 2012 sampai 2015 terus mengalami penurunan sampai -0,73 persen dari tahun-tahun sebelumnya.

Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2019 dimana tingkat belanja daerah Aceh mencapai Rp15.787.883.385 ribu rupiah, namun pertumbuhan ekonomi Aceh mengalami penurunan 4,14 persen dari tahun sebelumnya yang tumbuh pada angka 4,61 persen.

Dari uraian dan data tersebut tercermin suatu kondisi yang menggambarkan adanya indikasi perkembangan alokasi anggaran belanja pemerintah daerah yang cukup tinggi namun tidak diiringi oleh pertumbuhan ekonomi yang sepadan dan bahkan cenderung jauh dari harapan. Seharusnya dengan meningkatnya belanja daerah maka akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan adanya faktor yang menghambat seperti keterlambatan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang memberikan dampak negatif terhadap terlambatnya pelaksanaan program pemerintah daerah sehingga berpengaruh juga pada pelayanan publik masyarakat.⁸

Sektor keuangan memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah yaitu sebagai penggerak pertumbuhan sektor riil. Perkembangan sektor keuangan berpengaruh terhadap ekonomi, begitupula sebaliknya. Jika dalam perkembangannya sektor keuangan mengalami pertumbuhan yang baik maka semakin banyak sumber pembiayaan yang dapat dialokasikan ke sektor-sektor ekonomi produktif dan pada akhirnya akan

⁸ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <http://djpk.kemenkeu.go.id>. Diunduh tanggal 20 Februari 2022.

menambah pembangunan modal sektor ekonomi untuk meningkatkan produktivitasnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.⁹

Saat ini, hampir semua sektor bisnis dan keuangan khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia sangat tergantung terhadap pembiayaan perbankan sebagai sumber modal pembiayaan. Perbankan syariah memiliki peranan khusus untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara khususnya Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama muslim terbesar di dunia. Salah satu ciri utama perbankan syariah yang berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor riil dan ekonomi yaitu bahwa lembaga keuangan syariah lebih menekankan pada peningkatan produktivitas. Melalui pola pembiayaan maka sektor riil dan sektor keuangan akan bergerak secara seimbang. Akibatnya semakin pesat perbankan syariah maka akan semakin besar pula kontribusinya terhadap kinerja dan pertumbuhan ekonomi.¹⁰

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah Islam serta menerapkan sistem bagi hasil dan resiko antara penyedia dana (investor) dengan pengguna dana (pengusaha) dalam mengambil keuntungan. Berikut data pembiayaan perbankan syariah yang ada di provinsi Aceh dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021.

⁹ Ali Rama, *Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Macro economic Fundamentals and Unit Investment Trusts in Malaysia, World Applied Sciences Journal 23, Vol. 2: 53-56, 2013.

¹⁰ Mubasyir Jamili, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Investasi dan Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 1 No 1, 2017.

Tabel 1.4 Pembiayaan Perbankan Syariah Provinsi Aceh 2012-2021

Tahun	Pembiayaan Perbankan Syariah (Milliar Rupiah)
2012	30.787
2013	34.983
2014	36.099
2015	36.723
2016	76.232
2017	162.101
2018	168.557
2019	178.095
2020	284.586
2021	358.484

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (Data diolah 2022)

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa tingkat pembiayaan perbankan syariah di provinsi Aceh terus mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2021. Berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat karena sudah memiliki landasan hukum yang memadai.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Statistik Perbankan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan Aceh merupakan provinsi dengan pembiayaan bank syariah tertinggi di Indonesia dengan nominal 358.484 miliar. Sehingga melihat nominal pembiayaan bank syariah yang terbilang cukup besar akan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian daerah Aceh. Namun meningkatnya pembiayaan perbankan syariah di Aceh tidak

beriringan dengan pertumbuhan ekonomi Aceh yang cenderung bergerak fluktuatif.

Hal ini disebabkan karena kurang efektifnya pengalokasian dana pembiayaan yang disalurkan terhadap sektor-sektor ekonomi yang tidak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, salah satu contohnya ialah pembiayaan pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang kurang berkualitas sehingga tidak dapat memberikan keuntungan kepada bank syariah yang berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Belanja Daerah dan Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh Tahun 2012-2021”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang didapat dari latar belakang masalah di atas, yaitu:

1. Peningkatan dana otonomi khusus disetiap tahun tidak memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh, dimana pada tahun 2019 dana otonomi khusus mengalami peningkatan namun PDRB Aceh mengalami penurunan dari tahun 2018 yaitu 4,61 persen di tahun 2018 dan menurun mencapai 4,14 persen di tahun 2020.

2. Harusnya peningkatan belanja daerah dapat memberikan peningkatan signifikan terhadap perekonomian Aceh, namun kenyatannya belanja daerah di tahun 2020 yang mencapai Rp 15.798.122.413 triliun ternyata pertumbuhan ekonomi Aceh justru mengalami penurunan dengan nilai PDRB -0,37 persen.
3. Peningkatan pembiayaan perbankan syariah seharusnya dapat memberikan peningkatan bagi perekonomian Aceh, namun kenyataannya peningkatan pembiayaan di tahun 2021 sebesar Rp 358.484 miliar namun PDRB hanya meningkat 2,79 persen.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini khusus membahas mengenai Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Perbankan Syariah (Total pembiayaan BUS dan UUS) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh Tahun 2012-2021.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh dana otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh Tahun 2012-2021?
2. Bagaimana pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2012-2021?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2012-2021?

4. Bagaimana pengaruh dana otonomi khusus, belanja daerah, dan pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2012-2021?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2012-2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2012-2021.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2012-2021.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana otonomi khusus, belanja daerah dan pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2012-2021.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi manajemen perbankan/lembaga keuangan syariah

Penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur bagi lembaga keuangan syariah dalam mengkaji apakah dana otonomi khusus, belanja daerah dan pembiayaan perbankan syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.

2. Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak akademis terutama bagi para mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dan menambah wawasan serta dapat menjadi referensi penelitian mengenai dana otonomi khusus, belanja daerah, pembiayaan perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi.

3. Praktis

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para praktisi mengenai informasi tentang pengaruh dana otonomi khusus, belanja daerah dan pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

4. Penulis

Menambah ilmu, wawasan, serta pandangan khususnya bagi penulis sendiri untuk memahami secara mendalam tentang pengaruh dana otonomi khusus, belanja daerah dan pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang.¹¹
2. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah.¹²
3. Belanja daerah berdasarkan PSAP No.2, ialah “Semua pengeluaran dari

¹¹ Joko Untoro, *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Kawah Media, 2010), h. 39

¹² Rais Hakim, *Analisis Fleksibilitas Keuangan Pemerintah Daerah*, (DJPk: Surabaya, 2012), h. 44

Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.¹³

4. Pembiayaan perbankan syariah adalah “Penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil.”¹⁴

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan akan menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan topic dalam penelitian ini yaitu teori tentang pertumbuhan ekonomi, dana otonomi khusus, belanja daerah dan pembiayaan perbankan syariah.

BAB III : METODE PENELITIAN

¹³ Erlina Rambe, *et. Al.*, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 32.

¹⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 163.

Pada bab ini membahas tentang waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, teknik analisis data, analisis regresi linier berganda.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Membahas hasil dari penelitian yang berisi tentang gambaran objek penelitian dan hasil analisis dari pengolahan data, yaitu analisis data secara deskriptif.

BAB V : PENUTUP

Membahas tentang kesimpulan dan saran-saran dari analisa penelitian. Bab kelima adalah bab penutup, yang berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian dari temuan yang di dapat dalam penelitian hingga diharapkan dapat memberikan manfaat.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang dari satu periode ke periode lainnya.¹⁵ Sedangkan menurut Ali Ibrahim Hasyim, pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Ada tiga komponen dasar yang diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, diantaranya yaitu¹⁶:

1. Meningkatnya secara terus menerus persediaan barang.
2. Teknologi maju sebagai faktor utama yang menentukan drajat pertumbuhan dalam menyediakan aneka ragam barang kepada penduduknya.
3. Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideology, sehingga inovasi yang dihasilkan oleh IPTEK umat manusia dapat dimanfaatkan.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perubahan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika

¹⁵ Sukirno Sadono, *Pengantar Teori Makroekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 10.

¹⁶ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 231.

pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan positif, berarti kegiatan ekonomi pada periode perekonomian mengalami pertumbuhan negatif. Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan negatif, berarti kegiatan ekonomi dan periode tersebut mengalami penurunan.¹⁷

Menurut Lincoln Arsyad, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product (GDP)/Gross National Product (GNP)* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.¹⁸

Dalam zaman ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith dalam buku karangannya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, menganalisis sebab berlakunya pertumbuhan ekonomi dan faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Setelah Adam Smith, beberapa ahli ekonomi klasik lainnya seperti Ricardo, Malthus, Stuart Mill, juga membahas masalah perkembangan ekonomi:¹⁹

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Mereka lebih menaruh perhatiannya

¹⁷ Soeratno, *Ekonomi Makro Pengantar*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2004), h. 5.

¹⁸ Arsyad Lincoln, *Ekonomi Pembangunan: Edisi Keempat*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999), h.13.

¹⁹ *Ibid.*, h. 133-137.

pada pengaruh penambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka asumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal. Menurut teori ini, pada mulanya penambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal.

2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori Neo-Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Terus berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ahli ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori pertumbuhan tersebut adalah Robert Solow, yang kemudian diikuti oleh beberapa ahli lainnya seperti Edmund Phelps, Harry Johnson dan J.E. Meade. Dalam analisa neo klasik pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan digunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu.

3. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori pertumbuhan makro John Maynard Keynes. Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal. Untuk memacu proses pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan netto terhadap cadangan atau stok modal (*capital stock*). Menurut teori ini analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi dalam jangka panjang, sedangkan teori Harrod-Domar menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang.

4. Teori Schumpeter

Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (*entrepreneurship*) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, maupu memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya. Didorong oleh adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan dari inovasi tersebut, maka para pengusaha akan meminjam modal dan mengadakan investasi. Investasi ini akan mempertinggi kegiatan ekonomi suatu negara. Kenaikan tersebut selanjutnya juga akan mendorong pengusaha-pengusaha lain untuk menghasilkan lebih banyak lagi sehingga

produksi agregat akan bertambah. Selanjutnya Schumpeter menyatakan bahwa jika tingkat kemajuan suatu perekonomian semakin tinggi maka keinginan untuk melakukan inovasi semakin berkurang, hal ini disebabkan oleh karena masyarakat telah merasa mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan semakin lambat jalannya dan pada akhirnya tercapai tingkat keadaan tidak berkembang (*stationary state*). Namun keadaan tidak berkembang yang dimaksud di sini berbeda dengan pandangan klasik. Dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Sedangkan dalam pandangan klasik, keadaan tidak berkembang terjadi pada waktu perekonomian berada pada kondisi tingkat pendapatan masyarakat sangat rendah.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto adalah hasil penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit-unit ekonomi seluruh kegiatan ekonomi dalam batas wilayah suatu daerah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). PDRB dapat dihitung melalui pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan.²⁰

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produk Domestik Bruto

Besar kecilnya PDB dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya

²⁰ BPS, *Aceh Dalam Angka 2014*, (BPS Provinsi Aceh, 2014), h. 456.

konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan net ekspor (X-M).²¹

1. Konsumsi rumah tangga

Konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (*final demand*) atas berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia di dalam suatu perekonomian.

2. Investasi

Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu.

3. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dapat juga diartikan sebagai penggunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan.

4. Ekspor-Import

Ekspor dan impor sendiri merupakan kegiatan perdagangan internasional atau perdagangan antar-negara.

²¹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 139.

2.1.4 Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto

Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu langsung dan tidak langsung (alokasi).

1. Metode Langsung

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

a. Menurut Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antar masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu (satu tahun)²². Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu; (1) pertanian; (2) pertambangan dan penggalan; (3) industry pengolahan; (4) listrik, gas dan air bersih; (5) bangunan; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan konsumsi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan (9) jasa-jasa.

b. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir. Komponen-komponen tersebut meliputi:²³

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.

²² Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Aceh dalam Angka 2022*, h. 535

²³ *Ibid.*, h. 536

- 2) Konsumsi pemerintah.
- 3) Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- 4) Perubahan stok.
- 5) Ekspor *netto*.

c. Menurut Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya. Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu:²⁴

1) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya.

2) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh

²⁴ *Ibid.*, h. 538

sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah yang dimaksud merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai tambah yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

2. Metode Tidak Langsung atau Metode Alokasi

Dalam metode ini PDRB suatu wilayah diperoleh dengan menghitung PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas. Untuk melakukan alokasi PDRB wilayah ini digunakan beberapa alat ukur antara lain: Nilai produksi bruto atau netto setiap sektor/subsektor pada wilayah yang dialokasikan; jumlah produksi fisik; tenaga kerja; penduduk; dan alat ukur tidak langsung lainnya. Dengan menggunakan salah satu atau beberapa alat ukur dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing provinsi terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsektor.²⁵

- a. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

²⁵*Ibid.*, h. 538

- b. PDRB Atas Dasar Harga Konstan, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

2.1.5 Kegunaan Data Produk Domestik Regional Bruto

Data PDRB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain:²⁶

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB atas harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB atas harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.

²⁶ BPS, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*, (Jakarta: BPS, 2019), h. 6.

4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

2.2 Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah.²⁷ Otonomi Khusus Aceh dimulai sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diberlakukan. Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan bahwa dana otonomi khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Pada Pasal 183 ayat (2) disebutkan bahwa Dana Otonomi Khusus berlaku untuk jangka waktu 20 tahun dengan perincian (1) tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarnya setara dengan 2% plafon DAU nasional dan (2) tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh besarnya setara dengan 1% plafon DAU nasional.²⁸ Pemerintah Aceh telah menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 jo Peraturan Gubernur Aceh Nomor 114 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008—

²⁷ Rais Hakim, *Analisis Fleksibilitas Keuangan Pemerintah Daerah*, (DJPk: Surabaya, 2012), h. 44.

²⁸ BAKN Dewan Perwakilan Rakyat RI, *Penelahaan Atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh*, 2020

2027. Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh menjadi pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam menentukan program dan kegiatan prioritas yang pendanaannya bersumber dari Dana Otonomi Khusus.

Dalam Rencana Induk Otonomi Khusus Aceh terdapat tujuan Otonomi Khusus Aceh untuk mewujudkan (1) integrasi program pembangunan berdasarkan fungsi pemerintah, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah, ruang, dan waktu; (2) keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, dan (3) perwujudan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, serta berkeadilan dan berkelanjutan.²⁹

2.3 Belanja Daerah

2.3.1 Pengertian Belanja Daerah

Pengertian Belanja menurut Erlina, berdasarkan PSAP No.2, ialah “Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.”³⁰ Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, Belanja Daerah di definisikan sebagai kewajiba pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan aset bersih. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Erlina, *et.al*, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 32.

menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (Jenis Belanja), organisasi dan fungsi.³¹

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi.³²

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi ialah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang
- c. Belanja Subsidi
- d. Hibah
- e. Bantuan Sosial

2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi:

- a. Belanja Modal Tanah

³¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

³² *Ibid.*,

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - f. Belanja Aset Lainnya
3. Belanja Lain-Lain/Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa. Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang belanja dikelompokkan menjadi:

a. Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja:

- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- 3) Belanja Modal

b. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja bunga
- 3) Belanja subsidi
- 4) Belanja hibbah
- 5) Belanja bantuan sosial
- 6) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

2.3.2 Fungsi Belanja Daerah

Fungsi APBD terbagi atas 5 fungsi yakni fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi. Lihat pembahasannya seperti dibawah ini:³³

1. Fungsi Otorisasi

³³ Erlina, *et. al*, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 35.

Fungsi otorisasi adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan, berfungsi sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan, berfungsi sebagai pedoman untuk menilai kinerja pemerintah daerah.

4. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi, berfungsi sebagai dalam pembagiannya harus diarahkan sesuai dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya dan meningkatkan efisiensi/efektifitas ekonomi.

5. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi, berfungsi dalam pendistribusiannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2.3.3 Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah yang tercermin dalam APBD harus terencana dengan baik. Anggaran yang di rencanakan dengan baik akan memudahkan tahap implementasi dan memungkinkan dicapainya target secara efektif. Sebaliknya anggaran yang tidak terencana dengan baik meskipun diimplementasikan dengan baik tidak akan mencapai hasil secara efektif. Perencanaan belanja yang baik ditandai dengan:³⁴

³⁴ *Ibid.*, h. 36.

1. Adanya koherensi antara perencanaan belanja dalam APBD dengan dokumen perencanaan daerah.
2. Adanya standar satuan harga (SSH) yang merupakan standar biaya per unit Input.
3. Adanya analisis standar belanja (ASB) untuk menentukan kewajaran belanja suatu program atau kegiatan.
4. Adanya harga perkiraan sendiri (*Owner Estimate*) untuk menentukan kewajaran belanja modal yang pengadaannya ditenderkan.
5. Rendahnya tingkat senjangan anggaran belanja (*budgetary slack*).

2.3.4 Pengeluaran Pemerintah Pada Proyek Pembangunan Daerah

Belanja daerah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, dan lain-lain. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berikut beberapa proyek yang dibiaya oleh pemerintah daerah Aceh:

1. Pembangunan proyek jalan tol Sigli-Banda Aceh.
2. Pembangunan proyek industri Pengolahan Minyak Nilam
3. Pembangunan PLTA di 15 Kab/Kota di Aceh.
4. Pembangunan industri kemasan dan pengolahan Kakao.

5. Pembangunan proyek Bendungan Rukoh untuk sektor pertanian; dan proyek lainnya.

2.4 Pembiayaan Perbankan Syariah

2.4.1 Pengertian Pembiayaan

Dalam kegiatan penyaluran dana, lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dengan cara melakukan pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank karena berhubungan dengan rencana untuk memperoleh pendapatan. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penyertaan modal sementara dan kontijensi pada rekening administrasi serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.³⁵

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 yang dimaksud pembiayaan adalah “Penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil.”³⁶

Perbedaan mendasar antara pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank konvensional keuntungan

³⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 196.

³⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 163.

yang diperoleh yaitu melalui bunga, sedangkan bagi bank syariah keuntungan yang diperoleh berupa imbalan atau bagi hasil.³⁷

2.4.2 Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.³⁸ Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya : masyarakat yang tidak dapat di akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka laangan kerja baru artinya : dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja
5. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

³⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 73.

³⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta, YKPN, 2005), h.17.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan risiko, artinya : usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul, risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber sumber daya ekonomi.
4. Penyaluran kelebihan dana, artinya : dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) keada pihak yang kekurangan (minus) dana.³⁹

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan:

³⁹ *Ibid.*, h. 18.

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
2. *Safety*, yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.⁴⁰

2.4.3 Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada Bank syariah dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu sebagai berikut:⁴¹

1. Jenis pembiayaan dilihat dari sifat penggunaannya

- a. Pembiayaan produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan produktif ini terbagi lagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja (KMK)

Pembiayaan modal kerja ialah pembiayaan yang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan usaha bagi pembelian atau pengadaan barang dalam rangka usaha. Dengan kata lain pembiayaan ini juga untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain.

⁴⁰ Rivai dan Veithsal, *Islam Financial Manajement, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 6.

⁴¹ Muhammad Wandisyah R, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), h. 23-25.

2) Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik. Pembiayaan investasi ini digunakan untuk pembelian atau pengadaan barang-barang modal seperti pembelian mesin-mesin, bangunan, tanah untuk pabrik, alat-alat produksi baru, perbaikan alat-alat produksi secara besar-besaran.

d. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan arti lain pembiayaan ini juga dapat dipahami dengan penyediaan dana oleh bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan bank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain. Pembiayaan yang termasuk dalam pembiayaan konsumtif ini adalah pembelian atau pengadaan kendaraan pribadi, perumahan (untuk dipakai sendiri), untuk pembiayaan sewa/kontrak rumah, dan pembelian alat-alat rumah tangga. Dalam kelompok ini termasuk juga pembiayaan untuk seorang yang memiliki profesi untuk pengembangan profesi tertentu seperti dokter, akuntan, notaris dan lain-lain yang dijamin dengan pendapatan dan profesinya serta barang-barang yang dibeli dengan pembiayaan itu.

2. Jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktunya
 - a) *Short term financing* (Pembiayaan Jangka Pendek) ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Dalam pembiayaan jangka pendek, termasuk pembiayaan untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.
 - b) *Intermediate term financing* (Pembiayaan Jangka Waktu Menengah) ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari satu tahun sampai tiga tahun.
 - c) *Long term financing* (Pembiayaan Jangka Panjang) ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
 - d) *Demand loan* atau *call loan* ialah suatu bentuk pembiayaan yang setiap tahun dapat diminta kembali.
3. Jenis pembiayaan dilihat dari lembaga yang menerimanya
 - a) Pembiayaan untuk badan usaha pemerintah/daerah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki pemerintah.
 - b) Pembiayaan untuk badan usaha swasta, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki swasta.
 - c) Pembiayaan perorangan, yaitu pembiayaan yang diberikan bukan perusahaan tetapi kepada perorangan.
 - d) Pembiayaan untuk bank koresponden, yaitu lembaga pembiayaan dan perusahaan asuransi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada bank koresponden, lembaga pembiayaan dan perusahaan asuransi.

Dari berbagai jenis pembiayaan di atas, khusus pada bank syariah masing-masing dari jenis-jenis pembiayaan di atas dapat dibagi lagi berdasarkan akad dan prinsip yang digunakannya. Seperti dalam pembiayaan modal kerja, bisa menggunakan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna dan akad ijarah. Sedangkan pada pembiayaan produktif bisa digunakan semua akad dan prinsip yang ada pada pembiayaan bank syariah.

2.4.4 Pembiayaan Perbankan Syariah Pada Proyek Daerah

Penyelenggaraan konstruksi dan infrastruktur daerah Aceh perlu diperbaiki dan dikembangkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang lebih baik. Pencapaian kondisi pembangunan sektor konstruksi yang optimal memerlukan kontribusi dan dukungan dari seluruh masyarakat beserta seluruh aspek kelembagaan. Salah satunya yaitu peran sektor perbankan yang sangat diperlukan untuk membantu akses permodalan dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan konstruksi melalui pembiayaan. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi dalam perkembangan dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut pada pihak yang membutuhkan. Perbankan syariah menerapkan sistem *Profit loss sharing* dan tidak menerapkan sistem bunga.

Saat ini perbankan syariah sudah mulai memiliki pangsa pasar tersendiri dan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Total asset perbankan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah juga mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah bank dan jaringan kantor bank syariah. Penghimpunan dana pihak ketiga

dimanfaatkan secara maksimal oleh bank syariah untuk disalurkan melalui pembiayaan yang diberikan kepada sektor riil.

Berikut beberapa pembiayaan perbankan syariah yang disalurkan pada sektor riil:

1. PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) berpartisipasi dalam sindikasi pembiayaan proyek pembangunan pabrik Pupuk Iskandar Muda (PT PIM).
2. PT. Bank Aceh melakukan pembiayaan untuk proyek nasional seperti pembangkit listrik di Pekanbaru, Jaringan trans Sumatera.
3. Pembiayaan pada industri minyak goreng di Aceh oleh PT. Bank Aceh, dan pembiayaan-pembiayaan pada proyek lainnya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Kajian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Metode dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Muhammad Anwar, 2018, <i>Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Perbankan Syariah</i>	Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana otonomi khusus, belanja	Persamaan penelitian ini yaitu terdapat variabel dana otonomi khusus, belanja daerah dan pembiayaan perbankan

	<i>terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua</i> ⁴²	daerah dan pembiayaan perbankan syariah secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Papua.	syariah serta variabel terikat adalah pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Muhammad Anwar yaitu pada rentang waktu data penelitian.
2.	Taher, 2019, <i>Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017</i> ⁴³	Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah.	Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji variabel belanja daerah serta variabel terikat adalah PDRB. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Taher terdapat variabel dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

⁴² Muhammad Anwar, *Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua*, Jurnal Keuangan Daerah, Vol 1, No 1, 2018.

⁴³ Taher, *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017*, Jurnal Akuntansi, Vol 2, No 4, 2019.

3.	Mubasyir Jamil, 2017, <i>Analisis Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Investasi dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia</i> ⁴⁴	Metode analisis data menggunakan analisis regresi otomatis dan <i>Ordinary Least Square</i> . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah dan konsumsi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan investasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.	Persamaan pada penelitian ini yaitu terdapat pada variabel bebas pembiayaan bank syariah dan belanja pemerintah dan variabel terikatnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini mengkaji variabel investasi dan tidak mengkaji variabel dana otonomi khusus.
4.	Ade Ananto Terminanto, 2017, <i>Pengaruh Belanja Pemerintah, Pembiayaan Bank Syariah, Investasi dan Teanaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi:</i>	Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah, pembiayaan bank syariah, Investasi dan jumlah	Persamaan pada penelitian ini mengkaji variabel bebas yaitu belanja pemerintah dan pembiayaan perbankan syariah dan juga

⁴⁴ Mubasyir Jamil, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Investasi dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Islam, Vol. 1, No. 1, 2017.

	<i>Studi Kasus Data Panel Provinsi di Indonesia</i> ⁴⁵	tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.	variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini mengkaji variabel investasi dan tenaga kerja, serta tidak mengkaji variabel dana otonomi khusus.
5.	Ade Rosita Dwi, dkk, 2018, <i>Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal Terhadap PDRB di Kab/Kota Provinsi Papua</i> ⁴⁶	Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana otonomi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Papua, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB di	Persamaan pada penelitian ini yaitu mengkaji variabel bebas dana otonomi khusus dan variabel terikat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perbedaannya penelitian ini mengkaji variabel pendapatan asli daerah dan belanja

⁴⁵ Ade Ananto Terminanto, *Pengaruh Belanja Pemerintah, Pembiayaan Bank Syariah, Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Data Panel Provinsi di Indonesia*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 10, No. 1, 2017.

⁴⁶ Ade Rosita Dwi, et. al, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal Terhadap PDRB di Kab/Kota Provinsi Papua*, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 2 Jilid I, 2018.

		Papua.	modal serta tidak mengkaji variabel belanja daerah dan pembiayaan perbankan syariah.
6.	Megasari, 2020, <i>Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Utara</i> ⁴⁷	Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara, sedangkan belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara.	Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji variabel belanja daerah serta variabel terikat adalah PDRB. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Megasari tidak mengkaji variabel dana otonomi khusus dan pembiayaan perbankan syariah.
7.	Tari May Sabilla, 2022, <i>Pengaruh Belanja</i>	Metode analisis data menggunakan analisis regresi	Penelitian ini sama-sama mengkaji variabel

⁴⁷ Megasari, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Utara*, Journal of Islamic Management And Bussines, Vol. 3, No. 1, 2020.

	<i>Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri, Indeks Pembangunan Manusia Terhadap PDRB</i> ⁴⁸	data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja pemerintah, pendapatan asli daerah, indeks pembangunan manusia memiliki hubungan signifikan dan positif, sedangkan variabel penanaman modal dalam negeri memiliki hubungan tidak signifikan namun positif.	belanja pemerintah serta variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi (PDRB). Sedangkan perbedaan dari penelitian ini tidak mengkaji variabel dana otonomi khusus dan pembiayaan perbankan syariah.
8.	Early Ridho Kismawadi, 2019, <i>Pengaruh Inflasi, Pengangguran, Kemiskinan, dan pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia</i> ⁴⁹	Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi, pengangguran, kemiskinan, pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh secara simultan terhadap	Penelitian ini sama-sama mengkaji variabel pembiayaan perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat. Perbedaan dari penelitian Early yaitu mengkaji variabel inflasi, pengangguran,

⁴⁸ Tari May S, et.al, *Pengaruh Belanja Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri, Indeks Pembangunan Manusia Terhadap PDRB*, Jurnal Forum Ekonomi, Vol. 24 No. 1, 2022.

⁴⁹ Early Ridho K, et.al, *Pengaruh Inflasi, Pengangguran, Kemiskinan dan Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal At-Tijarah, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019.

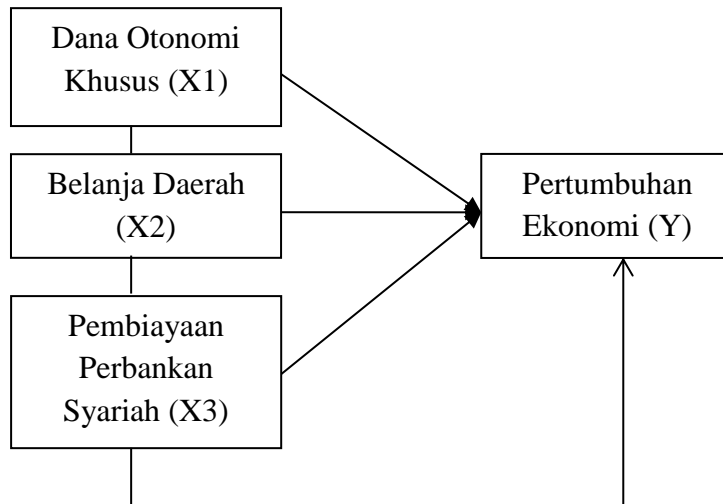
		pertumbuhan ekonomi di Indonesia.	dan kemiskinan, serta tidak mengkaji variabel Dana Otonomi Khusus dan Belanja Daerah.
9.	Shellenia Vitara A, 2021, <i>Pengaruh Desentralisasi Fiskal dalam Pengetasan Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Mediasi di Provinsi Papua</i> ⁵⁰	Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel dan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan semua variabel independen (desentralisasi fiskal: PAD, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal) terhadap variabel dependen (Pengetasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi). Secara parsial, DAU dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif	Penelitian ini sama-sama mengkaji dana otonomi khusus dan pertumbuhan ekonomi, namun tidak mengkaji belanja daerah dan pembiayaan perbankan syariah. Penelitian ini mengkaji variabel PAD, DAU, DAK dan belanja Daerah dengan variabel terikat kemiskinan.

⁵⁰Shellenia Vitara A, *et.al*, *Pengaruh Desentralisasi Fiskal dalam Pengetasan Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Mediasi di Provinsi Papua*, *Jurnalku*, Vol. 1 No. 3, September 2021.

		dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, PAD dan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	
10.	Rizky Airy P, ddk, 2021, <i>Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi</i> ⁵¹	Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dengan model data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di provinsi Jambi.	Persamaan dari penelitian Rizky sama-sama mengkaji variabel belanja daerah dan variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi, sedangkan perbedaannya penelitian ini tidak mengkaji variabel dana otonomi khusus dan pembiayaan perbankan syariah.

⁵¹ Rizky Airy P, et.al, *Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*, Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, Vol. 10 No. 2, Mei - Agustus 2021.

2.6 Kerangka Teoretis



Gambar 2.1
Kerangka Teoritis

2.7 Hipotesis

Rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

- H₀₁: Dana otonomi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.
- H_{a1}: Dana otonomi khusus berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.
- H₀₂: Belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.
- H_{a2}: Belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.
- H₀₃: Pembiayaan perbankan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.

H_{a3}: Pembiayaan perbankan syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.

H_{o4}: Dana otonomi khusus, belanja daerah dan pembiayaan perbankan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.

H_{a4}: Dana otonomi khusus, belanja daerah dan pembiayaan perbankan syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan meneliti seberapa besar pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁵²

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam hal ini penelitian ini dilakukan di provinsi Aceh. Untuk pengolahan data dibutuhkan data yang akurat maka dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan waktu yang digunakan adalah 10 tahun terakhir yaitu 2012-2021, dengan tujuan untuk menguatkan data dari penelitian sebelumnya.

3.3 Unit Analisis dan Horizon Waktu

3.3.1 Unit Analisis

Unit Analisis dapat berupa individual, pasangan, kelompok, organisasi dan kebudayaan. Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. Penelitian ini melihat perbandingan Dana

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 212.

Otonomi Khusus, Belanja Daerah, Pembiayaan Perbankan Syariah sebagai variabel bebas, dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel terikat.

3.3.2 Horizon Waktu

Horizon waktu terbagi menjadi dua yaitu studi *cross-sectional* dan studi *longitudinal*. Sebuah studi yang dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian disebut studi *one-shot* atau *cross-sectional*. Sebuah studi yang data variabel terikatnya dikumpulkan pada dua atau lebih batas waktu untuk menjawab pertanyaan disebut *longitudinal*. Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini studi *one-shot* atau *cross-sectional*. Karena dalam penelitian ini data yang dikumpulkan hanya sekali yaitu data Dana Otonomi Khusus, Belanja Daerah, Pembiayaan Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Aceh tahun 2012-2021.

3.4 Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka atau bilangan baik utuh maupun tidak utuh.⁵³ Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data mengenai data Dana Otonomi Khusus, Belanja Daerah, Pembiayaan Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Aceh tahun 2012-2021.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh periset

⁵³ *Ibid.*, h. 29.

sendiri. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengelolaan Kekayaan Aceh (BPKA), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.5 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini variabel terdiri dari variabel-variabel yang akan di uji peneliti yaitu:

1. Variabel bebas (variabel independen) adalah variabel yang mempengaruhi perubahan pada variabel terikat, terdiri dari Dana Otonomi Khusus (X_1), Belanja Daerah (X_2), dan Pembiayaan Perbankan Syariah (X_3).
2. Variabel terikat (variabel dependen) adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya perubahan dari variabel bebas, yaitu variabel pertumbuhan ekonomi (Y).

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Skala Pengukuran
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat	Rupiah

	bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.	
Dana Otonomi Khusus (X ₁)	Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah.	Rupiah
Belanja Daerah (X ₂)	Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan aset bersih.	Rupiah
Pembiayaan Perbankan Syariah (X ₃)	Pembiayaan perbankan syariah merupakan kegiatan penyediaan uang maupun barang dari pihak bank kepada nasabah atas dasar persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank dan juga pihak	Rupiah

	<p>nasabah yang dibiayai agar dapat mengembalikan uang tersebut sesuai jangka waktu yang telah disepakati dengan memberikan imbalan berupa bagi hasil dan juga mengamalkan sistem syariah dalam praktiknya.</p>	
--	---	--

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis deskriptif kuantitatif merupakan metode yang dilakukan dengan pengumpulan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan software SPSS Versi 23.00.

3.7 Metode Analisis Regresi Berganda

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel berikutnya. Rumus analisis regresi linier berganda yaitu:⁵⁴

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.64.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Pertumbuhan ekonomi

X₁ = Dana Otonomi Khusus

X₂ = Belanja Daerah

X₃ = Pembiayaan Perbankan Syariah

a = Konstanta

b₁ = Koefisien Regresi Variabel Dana Otonomi Khusus

b₂ = Koefisien Regresi Variabel Belanja Daerah

b₃ = Koefisien Regresi Variabel Pembiayaan Perbankan Syariah

e = Error

3.8 Uji Asumsi Klasik

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui normalitas masing-masing variabel.⁵⁵ Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik Kolmogorov Smirnov (K-S) yang dilakukan dengan membuat hipotesis nol (H₀) untuk data berdistribusi normal dan hipotesis alternatif (H_a) untuk data tidak berdistribusi normal. Data dikatakan memenuhi asumsi normalitas atau

⁵⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), h. 75.

berdistribusi normal jika nilai signifikansi dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05.

3.8.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi yang dilakukan ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen.⁵⁶ Uji multikolinieritas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai tolerance. Kedua ukuran ini menunjukkan sikap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. Multikolinieritas terjadi jika nilai tolerance $< 0,1$ atau sama dengan VIF > 10 . Jika nilai VIF tidak ada yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.⁵⁷

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama disebut terjadi homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama/berbeda disebut heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi jika *scatterplot* titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar di bawah maupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan titik mempunyai pola yang teratur. Heteroskedastisitas terjadi

⁵⁶ *Ibid.*, h. 170.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 171.

jika pada *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang.⁵⁸

3.8.4 Uji Autokorelasi

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut tidak layak dipakai prediksi. Ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:⁵⁹

- Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW di bawah -2 ($DW < -2$).
- Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada di antara -2 dan + 2 atau $-2 \leq DW \leq + 2$.
- Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas +2 atau $DW > +2$.

3.9 Uji Hipotesis

3.9.1 Uji T

Uji T digunakan untuk menguji apakah secara individu variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.⁶⁰ Hipotesisnya yaitu:

1. $H_0 : \beta_i = 0$, Dana Otonomi Khusus, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Perbankan Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 173.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 77.

⁶⁰ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS*, (Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h. 135.

$H_a : \beta_i \neq 0$, Dana Otonomi Khusus, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Perbankan Syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Level signifikansi yaitu : 5%

3. Kriteria pengujian : J

Jika nilai $t \text{ sig.} > \alpha=0,05$, maka hipotesis H_0 diterima dan H_a ditolak.

Jika nilai $t \text{ sig.} < \alpha=0,05$, maka hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima.

3.9.2 Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah secara serentak variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.⁶¹ Hipotesisnya yaitu:

1. $H_0 : \beta_i = 0$, Dana Otonomi Khusus, Belanja Daerah dan Pembiayaan Perbankan Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_a : \beta_i \neq 0$, Dana Otonomi Khusus, Belanja Daerah dan Pembiayaan Perbankan Syariah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Level signifikansi yaitu : 5%.

3. Kriteria pengujian :

Jika nilai $F \text{ sig.} > \alpha=0,05$, maka hipotesis H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika nilai $F \text{ sig.} < \alpha=0,05$, maka hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima

⁶¹ *Ibid.*, h. 136.

3.10 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam analisis ini terdapat suatu angka yang disebut dengan koefisien determinasi atau yang sering disebut dengan koefisien penentu, karena besarnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi (R^2), sehingga koefisien ini berguna untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Aceh

Provinsi Aceh terletak di ujung Barat Laut Sumatera (2°00'00" – 6°04'30" Lintang Utara dan 94°58'34" – 98°15'03" Bujur Timur) dengan Ibukota Banda Aceh, memiliki luas wilayah 56.758,85 km² atau 5.675.850 Ha (12,26 persen dari luas pulau Sumatera), wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.479.802 Ha dengan garis pantai 2.666,27 km². Secara administratif pada tahun 2009, provinsi Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 26 kecamatan, 755 mukim dan 6.423 gampong atau desa.⁶²

Provinsi Aceh memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan Nasional dan Internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat dengan batas wilayahnya : sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Teluk Benggala, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara.⁶³

Perkembangan perekonomian Provinsi Aceh dilihat dari 3 kawasan industry yaitu Truman, Pasir Raja dan Labuhan Haji yang berada di Kabupaten Aceh Selatan. Prasarana jalan darat Provinsi Aceh sepanjang 15.458,48 km yang

⁶² BPS Kota Langsa, 2021, diakses pada tanggal 30 Juni 2022

⁶³ *Ibid.*,

terdiri dari jalan negara sepanjang 1.782,78 km dan jalan Provinsi sepanjang 1.701,82 km. untuk transportasi laut, terdapat 6 pelabuhan laut utama yaitu Sabang, Meulaboh, Lhokseumawe, Kuala Langsa, dan Malahayati yang sekaligus sebagai pelabuhan penyeberangan, pelabuhan penyeberangan yang lain adalah Pelabuhan Balohan. Povinsi ini juga memiliki Bandar Udara yaitu Bandar Udara Sultan Iskandar Muda yang terletak di Kota Banda Aceh. beberapa prasarana penyeberangan di Provinsi Aceh pernah hancur oleh bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami tahun 2004, sebagian telah diperbaiki dan pada saat ini telah berfungsi dengan baik.

Hampir seluruh pelabuhan laut tersebut belum berfungsi secara optimal. Ini terkait dengan kelengkapan sarana dan prasaran. Beberapa pelabuhan yang telah memiliki fasilitas *crain* adalah pelabuhan Malahayati, Pelabuhan Krung Geukuh dan Pelabuhan Sabang untuk mendukung kegiatan ekspor-impor. Namun kegiatan ekspor-impor ini tidak didukung oleh ketersediaan komoditas ekspor dengan skala ekonomi yang memadai sehingga terjadi *trade imbalance* di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh mempunyai beragam kekayaan sumber daya alam antara lain minyak dan gas bumi, pertanian, industry, perkebunan, perikanan darat dan laut, pertambangan umum yang memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.

4.1.2 Visi dan Misi Provinsi Aceh

Adapun visi dan misi pemerintah Aceh yaitu⁶⁴ :

Visi :

Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani.

Misi :

1. Reformasi birokrasi yang tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan public yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum;
5. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegritas;

⁶⁴ Pemerintah Aceh, <http://acehprov.go.id>. Diakses pada tanggal 3 Juli 2022

6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;
7. Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industry, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;
8. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industry jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif unruk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

4.1.3 Deskripsi Data Penelitian

1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh

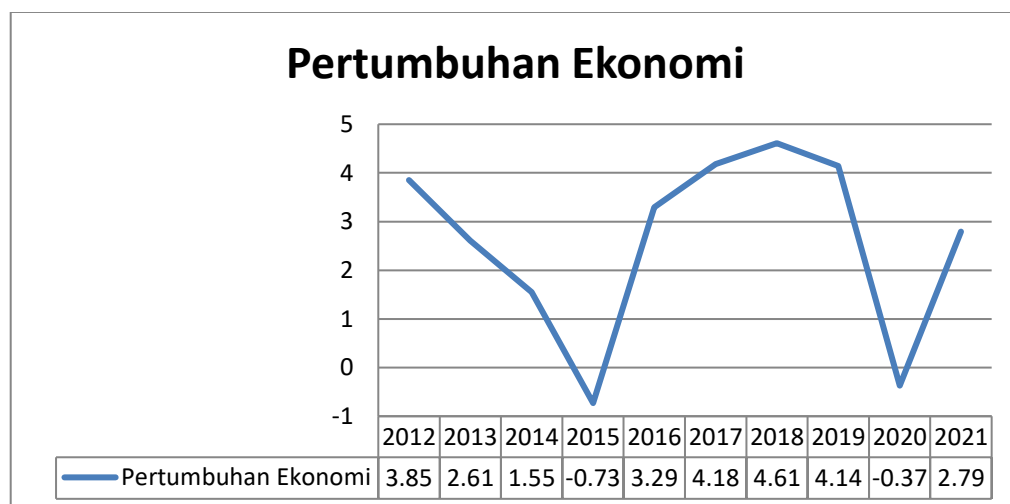
Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan adanya penurunan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi modal (investasi pada tanah, peralatan, sarana dan prasarana), sumber daya alam, sumber daya manusia baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduknya. Kemajuan teknologi, akses terhadap informasi, keinginan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dapat diketahui melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka setiap daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah itu sendiri. Dalam rangka evaluasi dan proses penyusunan perencanaan dibutuhkan berbagai indikator-indikator yang dapat menggambarkan potensi dan kemajuan pembangunan daerah.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel berikut.

Grafik 4.1

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Tahun 2012-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (Data diolah 2022)

Dari Grafik 4.1 dapat dijelaskan bahwa PDRB Provinsi Aceh sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 bergerak fluktuatif. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi provinsi Aceh mengalami kontraksi hingga minus 0,74

persen. Hal ini disebabkan karena adanya *Corona virus disease 2019*, serta penggunaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang tidak efektif sehingga mempengaruhi kebijakan moneter dan tidak ada peningkatan daya tarik ekonomi kepada para investor. Pada tahun 2021 PDRB kembali membaik. Rendahnya tingkat pertumbuhan PDRB dikarenakan belum adanya peningkatan investasi di Aceh selama 2021 sehingga berdampak terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya.

2. Perkembangan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh

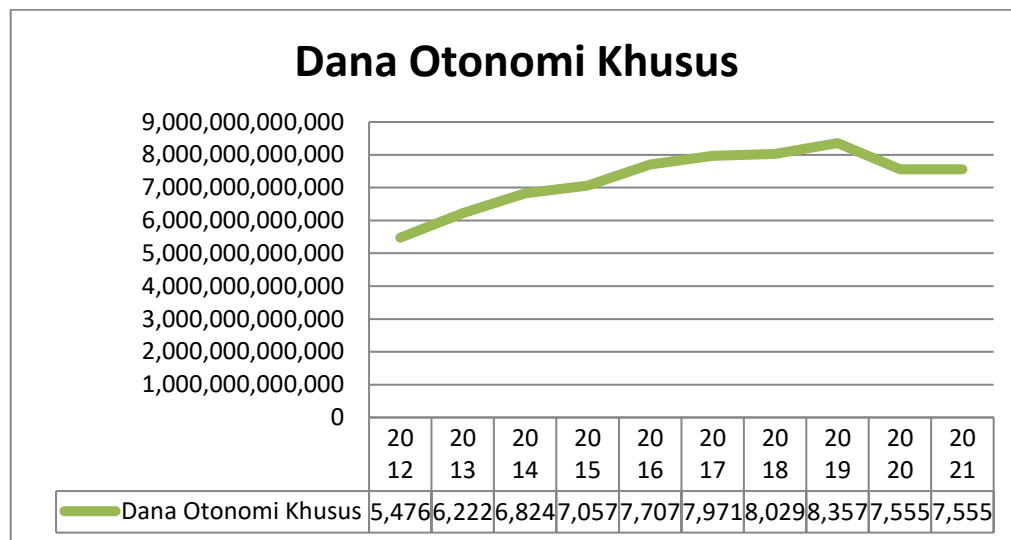
Kebijakan otonomi khusus untuk Provinsi Aceh pada dasarnya merupakan pemberian kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah provinsi dan rakyat Aceh. Kewenangan yang berarti peran dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur, menyelenggarakan dan melaksanakan pemerintahannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan status otonomi khusus diberikan kepada Provinsi Aceh mengingat karakter perjuangan masyarakat Aceh pada masa lampau. Selain itu, Undang-Undang ini lahir dengan pertimbangan bahwa pemerintahan dan pembangunan di Aceh belum dapat mencerminkan kesejahteraan rakyat, keadilan, serta pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dana otonomi khusus diberikan dengan maksud agar kebutuhan tersebut terpenuhi, khususnya pembangunan yang tertinggal dikarenakan konflik yang terjadi serta pembagian dalam penerimaan sumber daya alam yang tidak sesuai.

Perkembangan dana otonomi khusus provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 4.2

Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun 2012-2021



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (Data diolah 2022)

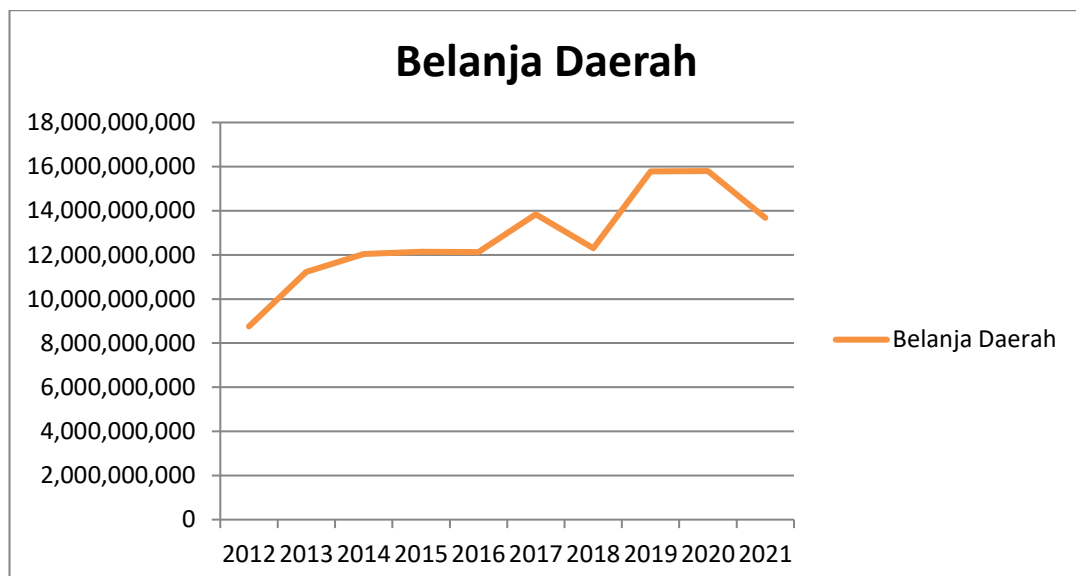
Dari Grafik 4.2 dapat dijelaskan bahwa dana otonomi khusus provinsi Aceh terus mengalami kenaikan dan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 8,35 triliun rupiah. Dana otonomi khusus pada tahun 2019 dipergunakan paling besar untuk pembangunan infrastruktur sebesar 3,6 triliun rupiah. Disamping itu, alokasi dana otonomi khusus paling rendah yaitu pada tahun 2012 sebesar 5,47 triliun rupiah.

3. Perkembangan Belanja Daerah Provinsi Aceh

Pemerintahan daerah dapat terselenggarakan dengan baik disebabkan oleh faktor sumber daya yang dapat menggerakkan jalannya kegiatan pemerintah daerah. Faktor keuangan merupakan faktor utama dari sumber daya financial yang

digunakan sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Keuangan daerah berarti segala bentuk kekayaan milik daerah yang berhubungan dengan seluruh hak dan kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah yang ada di dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Perkembangan belanja daerah Aceh dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 4.3
Belanja Daerah Provinsi Aceh Tahun 2012-2021



Sumber: Badan Statistik Provinsi Aceh (Data diolah 2022)

Berdasarkan Grafik 4.3 diatas dapat dijelaskan tingkat belanja daerah Provinsi Aceh dari tahun 2012 sampai 2021 bergerak fluktuatif dan cenderung terus mengalami peningkatan. Belanja tertinggi yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp15.7 triliun. Namun belanja daerah Aceh mengalami penurunan di tahun 2021 mencapai Rp13.6 triliun.

4. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Provinsi Aceh

Perkembangan industry perbankan syariah di Aceh mulai tumbuh dengan baik khususnya setelah terjadi krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 1997/1998. Ekonomi syariah di Aceh menunjukkan kondisi yang cukup baik dari tahun ke tahun, yang mana dapat kita lihat dari pertumbuhan perbankan syariah, meskipun lambat akan tetapi tumbuh positif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan perbankan syariah di Aceh dapat dilihat dari segi asset, pembiayaan dan Daba Pihak Ketiga (DPK). Adapun gambaran mengenai pembiayaan perbankan syariah di provinsi Aceh dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 4.4

Pembiayaan Perbankan Syariah Tahun 2012-2021



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (Data diolah 2022)

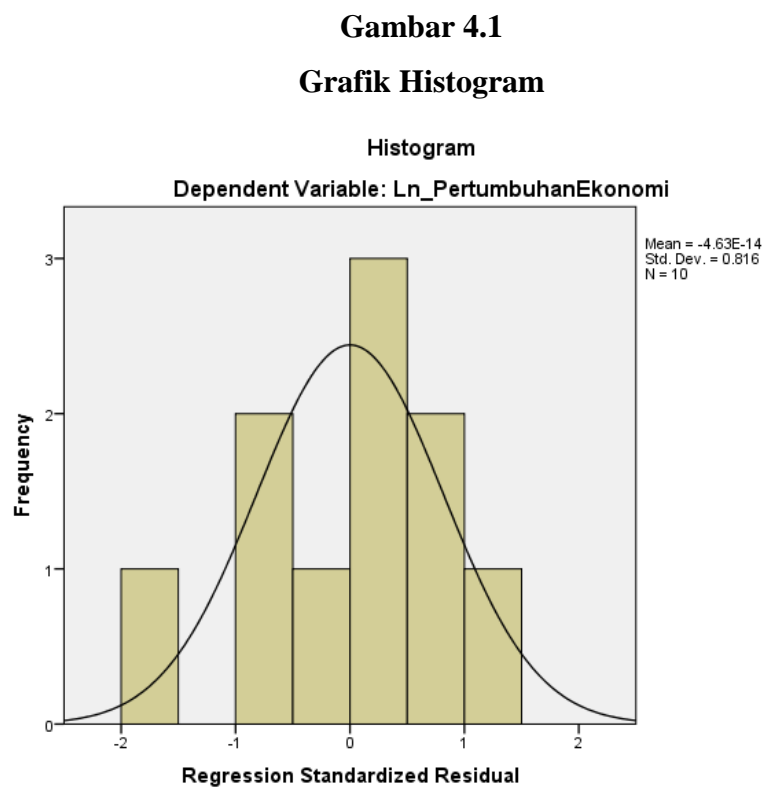
Berdasarkan Grafik 4.3 dapat dijelaskan bahwa selama periode 2012 sampai 2021 tingkat pembiayaan perbankan syariah di Provinsi Aceh tumbuh positif dan terus mengalami kenaikan mencapai sebesar 358.484 miliar rupiah.

4.1.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil berasal dari populasi yang sama atau berdistribusi normal. Metode yang digunakan untuk melakukan uji normalitas data dalam penelitian ini dengan menggunakan grafik histogram, grafik P-Plot dan *Kolmogorov-Smirnov*.

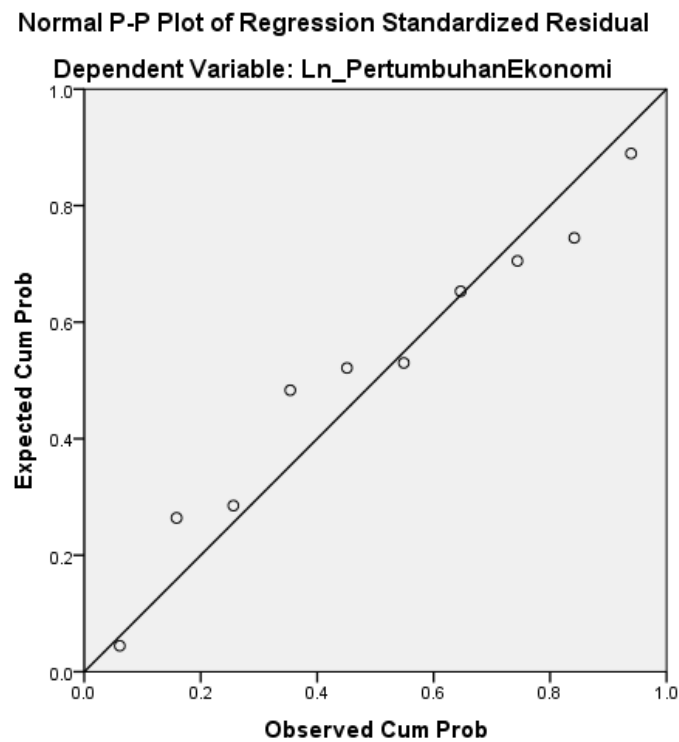
Adapun hasil grafik histogram uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut.



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa grafik histogram membentuk lonceng dan tidak condong ke kanan atau ke kiri sehingga grafik histogram tersebut dinyatakan normal.

Adapun hasil uji normalitas dengan melihat grafik P-Plot yang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.2
Normal Probability P-Plot



Dari grafik di atas terlihat bahwa grafik normal *probability p-plot* terlihat titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya, garis ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Setelah melihat grafik P-Plot, selanjutnya dilakukan analisis terhadap uji normalitas melalui *Kolmogorov Smirnov*.

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01878773
Most Extreme Differences	Absolute	.179
	Positive	.110
	Negative	-.179
Test Statistic		.179
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp.Sig (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dengan uji *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.2
Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Ln_Dana Otonomi Khusus	.257	3.887
	Ln_Belanja Daerah	.233	4.287
	Ln_Pembiayaan Perbankan Syariah	.366	2.734

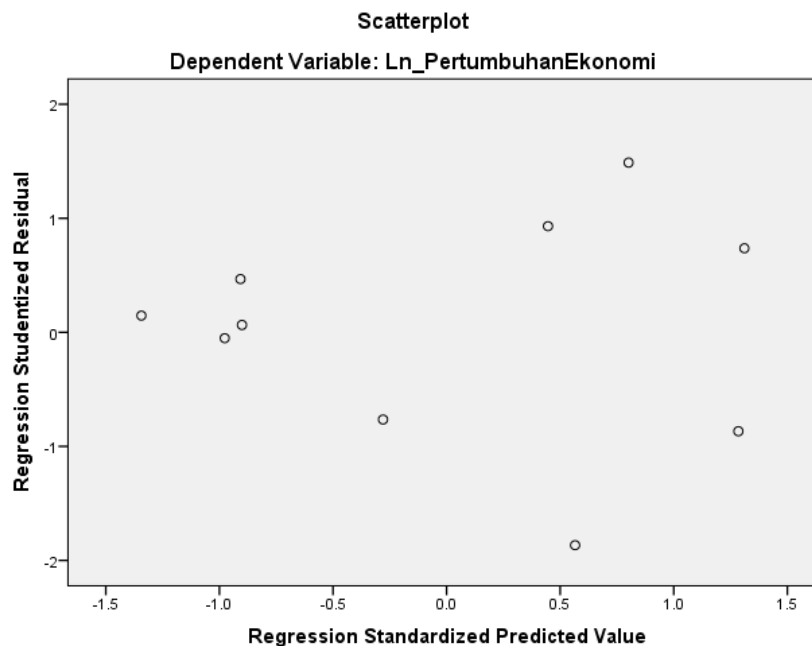
Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai *Tolerance* untuk variabel dana otonomi khusus sebesar $0,257 > 0,1$ dan nilai *VIF* sebesar $3,887 < 10$, sehingga variabel dana otonomi khusus dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.
- b. Nilai *Tolerance* untuk variabel belanja daerah sebesar $0,233 > 0,1$ dan nilai *VIF* sebesar $4,287 < 10$, sehingga variabel belanja daerah dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.
- c. Nilai *Tolerance* untuk variabel pembiayaan perbankan syariah sebesar $0,366 > 0,1$ dan nilai *VIF* sebesar $2,734 < 10$, sehingga variabel pembiayaan perbankan syariah dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji grafik. Uji grafik untuk pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik *scatter plot* sebagai berikut.

Gambar 4.3
Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar grafik di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar secara merata baik di atas sumbu X ataupun Y, serta tidak titik berkumpul di suatu tempat dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, karena variabel independen tidak saling mempengaruhi.

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya)⁶⁵. Jika terjadi autokorelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Berikut adalah hasil pengolahan autokorelasi dengan menggunakan aplikasi SPSS 23.0:

⁶⁵ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi dengan SPSS* (Yogyakarta: CV. Andi, 2011), h. 126.

Tabel 4.3
Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.972 ^a	.945	.917	.02301	2.042

a. Predictors: (Constant), Ln_Pembiayaan Perbankan Syariah, Ln_Dana Otonomi Khusus, Ln_Belanja Daerah

b. Dependent Variable: Ln_Pertumbuhan Ekonomi

Dari tabel di atas diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2.042. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan bahwa nilai $4-dU < dw < 4-dL$ ($1.9837 < 2.042 < 3.4747$) yang berarti tidak dapat disimpulkan apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Oleh karena itu, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi adalah dengan metode Uji Run Test. Berikut adalah hasil pengolahan Run Test.

Tabel 4.4
Uji Run Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.00148
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	5
Total Cases	10
Number of Runs	7
Z	.335
Asymp. Sig. (2-tailed)	.737

a. Median

Berdasarkan output diatas, diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,737 > 0,005$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi. Dengan demikian, masalah autokorelasi yang tidak dapat terselesaikan dengan durbin Watson dapat teratasi dengan uji Run Test.

4.1.5 Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.5
Hasil Analisis Regresi Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	9.827	2.537		3.873	.008
	Ln_DanaOtonomiKhusus	-.043	.116	-.070	-.371	.723
	Ln_BelanjaDaerah	.100	.092	.217	1.091	.317
	Ln_PembiayaanPerbankanSyariah	.071	.013	.849	5.345	.002

a. Dependent Variable: Ln_PertumbuhanEkonomi

Dari hasil analisis regresi berganda di atas, dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{LnPE} = \text{Ln } 9,827 - 0,043 \text{ LnDok} + 0,100 \text{ LnBd} + 0,071 \text{ LnPps} + e$$

4.1.6 Hasil Uji T

Nilai t hitung digunakan untuk menguji apakah variabel bebas tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat atau tidak. Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti jika nilai t hitung variabel tersebut lebih

besar dibandingkan dengan nilai t tabel. Dengan df: $\alpha(n-k)$ atau 0,05 (10-3) diperoleh nilai t tabel sebesar 1.8945. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Uji T

Model	T	Sig.
1 (Constant)	3.873	.008
Ln_Dana Otonomi Khusus	-.371	.723
Ln_Belanja Daerah	1.091	.317
Ln_Pembiayaan Perbankan Syariah	5.345	.002

Dari Tabel 4.6 maka hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel dana otonomi khusus yang diperoleh nilai dari t hitung $-0,371 < \text{nilai t tabel } 1.8945$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel dana otonomi khusus memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan hasil signifikansi sebesar $0,723 > 0,05$ berarti tidak signifikan serta variabel dana otonomi khusus memiliki nilai koefisien sebesar $-0,043$ yang berarti apabila dana otonomi khusus naik satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 0,043. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel dana otonomi khusus tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh tahun 2012-2021. Dengan demikian maka H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak.

2. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel belanja daerah yang diperoleh nilai dari t hitung $1,091 < \text{nilai t tabel } 1.8945$, maka dapat disimpulkan bahwa

variabel belanja daerah memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan hasil signifikansi sebesar $0,317 > 0,05$ berarti tidak signifikan serta variabel belanja daerah memiliki nilai koefisien sebesar $0,100$ yang berarti apabila belanja daerah naik satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar $0,100$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel belanja daerah tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh tahun 2012-2021. Dengan demikian maka H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak.

3. Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pembiayaan perbankan syariah yang diperoleh nilai dari t hitung $5,345 >$ nilai t tabel $1,8945$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan perbankan syariah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan hasil signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ berarti signifikan, serta variabel pembiayaan perbankan syariah memiliki nilai koefisien sebesar $0,071$ yang berarti apabila pembiayaan perbankan syariah naik satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar $0,071$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan perbankan syariah signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh tahun 2012-2021. Dengan demikian maka H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak.

4.1.7 Hasil Uji F

Pembuktian hipotesis dengan uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Untuk menyimpulkan

apakah model masuk dalam kategori cocok (*fit*) atau tidak, kita harus membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan derajat bebas, df: α , (k-1), (n-k) yaitu 0,05, (3-1), (10-3) diperoleh besarnya nilai F tabel yaitu 19,35. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.054	3	.018	34.094	.000 ^b
	Residual	.003	6	.001		
	Total	.057	9			

a. Dependent Variable: Ln_PertumbuhanEkonomi

b. Predictors: (Constant), Ln_PembiayaanPerbankanSyariah, Ln_DanaOtonomiKhusus, Ln_BelanjaDaerah

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dilihat nilai F hitung sebesar 34,094 dengan hasil signifikansi sebesar 0,000. Maka hasil ini dapat dibandingkan dengan nilai F tabel sebesar 19,35 dengan menggunakan Sig. 0,05. Sehingga hasil yang diperoleh dari F hitung > F tabel yaitu sebesar $33,724 > 19,35$, dengan nilai Sig. $0,000 < 0,05$, yang disimpulkan bahwa variabel independen (dana otonomi khusus, belanja daerah dan pembiayaan perbankan syariah) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) di Aceh pada tahun 2012-2021.

4.1.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Adapun hasil analisis koefisien determinasi yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.8
Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.972 ^a	.945	.917	.02301

- a. Predictors: (Constant), Ln_PembiayaanPerbankanSyariah,
Ln_DanaOtonomiKhusus, Ln_BelanjaDaerah
- b. Dependent Variable: Ln_PertumbuhanEkonomi

Dari tabel 4.12 di atas dapat dilihat nilai Adjusted R Square sebesar 0,917. Artinya dana otonomi khusus, belanja daerah dan pembiayaan perbankan syariah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh sebesar 91,7% sedangkan sisanya 8,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

4.2 Pembahasan

1. Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Dari hasil pengujian menggunakan SPSS versi 23.00 variabel dana otonomi khusus tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2012-2021 yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,723 > 0,05$. Nilai koefisien variabel dana otonomi khusus sebesar $-0,043$ yang berarti setiap terjadi penurunan dana otonomi khusus sebesar 1 satuan, maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar $0,043$. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana otonomi khusus tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh.

Berdasarkan hasil uji data dan analisis data dapat dinyatakan bahwa alokasi penggunaan dana otonomi khusus pemerintah Aceh belum bisa memacu pertumbuhan ekonomi secara signifikan, hal ini dikarenakan pengalokasian dana otonomi khusus kepada pemerintah Aceh yang terus naik dan tumbuh setiap tahunnya tidak berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini bisa terjadi dikarenakan pemanfaatan dana otonomi khusus yang belum maksimal digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan juga kebijakan yang diambil dalam pengalokasian dana otonomi khusus terhadap anggaran belanja pemerintah yang tidak tepat sasaran serta tidak terfokus pada sektor-sektor perekonomian yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Aceh dan masih tingginya angka korupsi yang terjadi terhadap dana otonomi khusus.

Menurut peneliti hal ini sesuai dengan yang pemberitaan pada (<https://regional.kompas.com>) yang menyatakan bahwa Dana Otsus yang diterima oleh Provinsi Aceh pemanfaatannya belum maksimal digunakan untuk kesejahteraan rakyat seperti meningkatkan pendidikan, kesehatan dan perekonomian, tetapi lebih dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang kurang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Seperti pembangunan Gedung Serba Guna di Nagan Raya, pembangunan Pasar Sayur, Pasar Buah, Pasar Induk, Taman Bermain, dan Pabrik Garam dan Pabrik Pakan Ternak di Lhokseumawe, pembangunan Rumah Sakit Jiwa dan Panti Rehab untuk pecandu narkoba di Aceh Barat yang dibangun dengan Dana Otonomi Khusus Aceh yang bernilai milyaran rupiah itu terbengkalai, bahkan ada yang setengah jadi dan juga sudah rampung namun tidak difungsikan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sisca (2019) dengan judul “Analisis Dampak Penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh” dengan hasil penelitian menyatakan bahwa alokasi penggunaan dana otonomi khusus pemerintah Aceh baik melalui otonomi khusus provinsi maupun alokasi otonomi khusus kabupaten dan kota belum bisa memacu pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ade (2018) dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal terhadap PDRB di Kab/Kota Provinsi Papua” dengan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan, dana otonomi khusus berpengaruh positif dan signifikan sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Kab/Kota Provinsi Papua.

2. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel belanja daerah tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,317 > 0,05$. Nilai koefisien variabel belanja daerah sebesar 0,100 menunjukkan bahwa jika belanja daerah mengalami peningkatan 1 persen, maka akan menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,100 persen.

Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal pemerintah Aceh melalui APBA (Anggaran Pendapatan Belanja Aceh) terutama dalam aspek pengeluaran pemerintah belum mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi Aceh, ini

dikarenakan pengalokasian porsi belanja daerah tidak menekankan kepada sektor-sektor yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti sektor infrastruktur.

Secara real realisasi belanja daerah Aceh mengalokasikan belanja pegawai lebih besar dari alokasi belanja barang untuk pemeliharaan infrastruktur dan belanja modal untuk pelayanan public. Kondisi inilah yang menyebabkan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tidak mampu untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sesuai dengan teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik menurut Ricardo dan Mill yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang perekonomian akan mencapai *stationary state*, dimana suatu keadaan perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salbi & Antje (2019) dengan judul “Analisis Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mamika” dengan hasil bahwa belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamika. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Mubasyir (2017) dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Investasi dan Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia” hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan bank syariah dan belanja pemerintah signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan variabel investasi tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

3. Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Variabel pembiayaan perbankan syariah berpengaruh positif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Aceh yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. Nilai koefisien variabel pembiayaan perbankan syariah adalah sebesar 0,071 yang berarti setiap terjadi kenaikan pembiayaan perbankan syariah sebesar 1 persen, maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,071 persen.

Hasil ini mengkonfirmasi bahwa sektor perbankan syariah berkontribusi positif dan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Alasannya adalah pada saat terjadi peningkatan total pembiayaan kepada sektor riil akan mendorong adanya usaha-usaha baru yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan untuk kegiatan produksi pada sektor riil yang ada di masyarakat akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan perekonomian sektor riil berarti terjadi peningkatan aktivitas ekonomi yang mana akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, bank syariah sebagai lembaga intermediasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian pembiayaan, seperti pembiayaan dalam bentuk modal kerja, investasi dan konsumsi terhadap sektor usaha produktif.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Prastowo (2018) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi

Empiris di 13 Negara” dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa pembiayaan syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firman (2022) yang berjudul “Dampak Pembiayaan Bank Kalbar Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa dana otonomi khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, dimana t hitung sebesar -0.371 sedangkan t tabel sebesar 1.8945 atau $(-0.371 < 1.8945)$ dengan nilai signifikansi sebesar 0.723 ($0.723 > 0.05$) yang berarti tidak signifikan. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya dana otonomi khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomu di Aceh, sehingga semakin tinggi dana otonomi khusus maka akan membuat ekonomi di Aceh menurun.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, dimana t hitung sebesar 1.091 sedangkan t tabel sebesar 1.8945 atau $(1.091 < 1.8945)$ dengan nilai signifikansi sebesar 0.317 ($0.317 > 0.05$) yang berarti tidak signifikan. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya belanja daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomu di Aceh, sehingga semakin tinggi belanja daerah maka akan membuat ekonomi di Aceh menurun.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pembiayaan perbankan syariah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, dimana t hitung sebesar 5.345 sedangkan t tabel sebesar 1.8945 atau

(5.345 > 1.8945) dengan nilai signifikansi sebesar 0.002 ($0.002 < 0.05$) yang berarti signifikan. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya pembiayaan perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, sehingga semakin tinggi pembiayaan maka akan membuat ekonomi di Aceh meningkat.

4. Secara simultan, variabel dana otonomi khusus, belanja daerah dan pembiayaan perbankan syariah dimana hasil uji F sebesar 34.094 lebih besar dari F tabel 19.35 dengan nilai F Sig. $0.000 < 0.05$ maka berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh.

5.2 Saran

1. Pemerintah harus mampu memanfaatkan anggaran dana otonomi khusus dan mewujudkan sistem transparansi dalam pengalokasian dana otonomi khusus, sehingga alokasinya selalu tepat sasaran sesuai dengan tujuan awal adanya dana otonomi khusus. Serta perlu adanya control dari pemerintah pusat dan lembag-lembaga kemasyarakatan dalam pemakaian dana otonomi khusus. Sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah.
2. Belanja daerah sebaiknya difokuskan kepada sektor-sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi seperti sektor infrastruktur dan kepada belanja modal untuk pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Muhammad. 2018. *Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua*. Jurnal Keuangan Daerah. Vol 1. No 1.
- Arifin. Hadi Imamul dan Gina. 2013. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Bandung: Grafindo.
- Arsyad Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- Ayub Al Anshori. Abie. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- BAKN Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2020. *Penelahaan Atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh*.
- BPS. 2019. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*. Jakarta: BPS.
- Hakim Rais. 2012. *Analisis Fleksibilitas Keuangan Pemerintah Daerah*. DJPK: Surabaya.
- Hamzah Ardi. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 38 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Periode 2001-2006)*. Jurnal Balitbang Depdagri. Vol 9. No. 3.
- Hasyim Ibrahim Ali. 2016. *Ekonomi Makro*. Jakarta: Kencana.
- Jamili Mubasyir. 2017. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Investasi dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Inonesia*. Jurnal Ekonomi, keuangan dan perbankan syariah. Vol. 1. No. 1.
- Kasmir. 2002. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grapindo Persada.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung. 2014. *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar Edisi Kelima*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Rambe Erlina O.S. dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ridwan Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Rivai dan Veithsal. 2008. *Islac Financial Manajement, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rudriger Donburs. 2012. *Ekonomi Makro*. Jakarta: Media Global Edukasi.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno Sadono. 2006. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suseno. 2012. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Taher. 2019. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017*. Jurnal Akuntansi. Vol 2. No 4.
- Untoro Joko. 2010. *Ekonomi Makro*. Jakarta: Kawah Media.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian

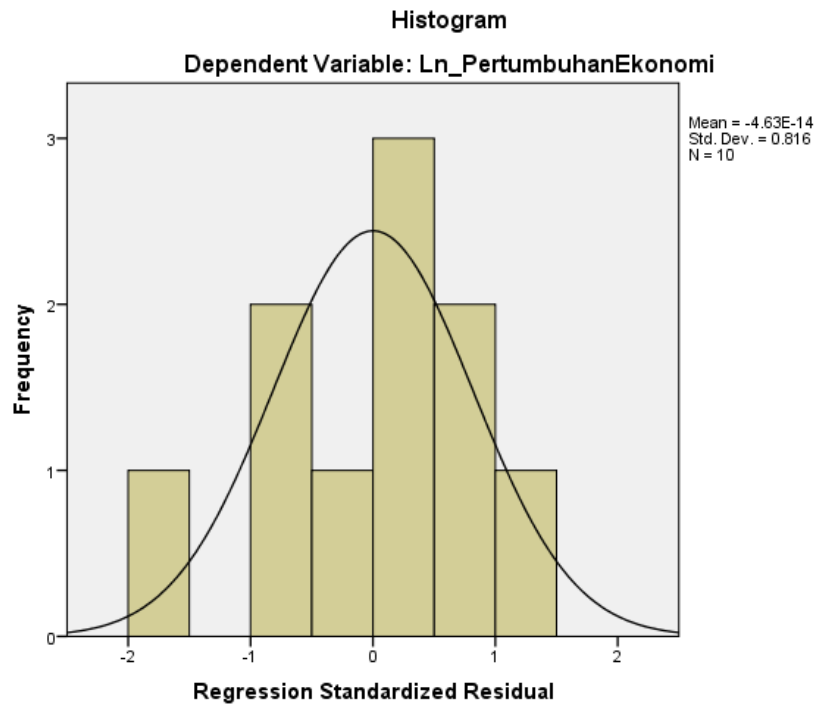
Tahun	Dana Otonomi Khusus (Rupiah)	Belanja Daerah (Ribu Rupiah)	Pembiayaan Perbankan Syariah (Milliar Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (Milliar Rupiah)
2012	5.476.288.764.000	8.757.319.943	30.787	108.914
2013	6.222.785.783.000	11.220.427.555	34.983	111.755
2014	6.824.386.514.000	12.045.847.341	36.099	113.490
2015	7.057.756.971.000	12.135.635.484	36.723	112.665
2016	7.707.216.942.000	12.119.713.196	76.232	116.374
2017	7.971.646.295.000	13.832.848.610	162.101	121.240
2018	8.029.791.593.000	12.306.306.187	168.557	126.824
2019	8.357.471.654.000	15.787.883.385	178.095	132.069
2020	7.555.278.348.000	15.798.122.413	284.586	131.580
2021	7.555.827.806.000	13.682.744.002	358.484	135.249

Lampiran 2. Hasil Transformasi Ln

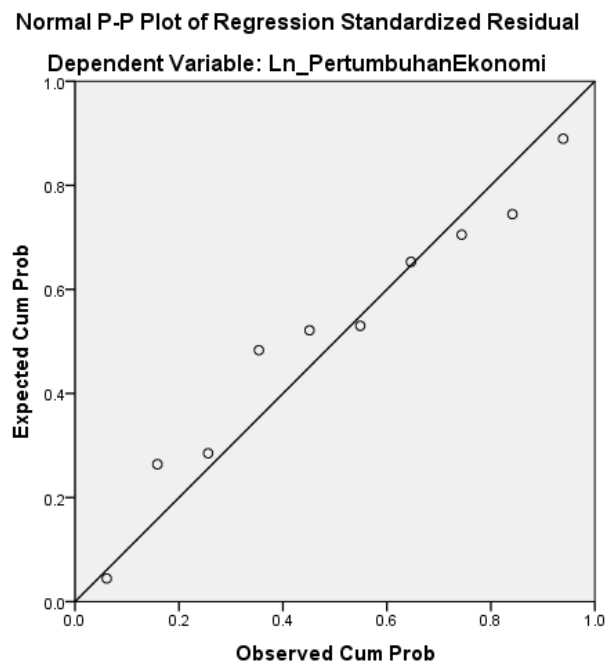
Tahun	Ln_Dana Otonomi Khusus	Ln_Belanja Daerah	Ln_Pembiayaan Perbankan Syariah	Ln_Pertumbuhan Ekonomi
2012	29.33	22.89	10.33	11.60
2013	29.46	23.14	10.46	11.62
2014	29.55	23.21	10.49	11.64
2015	29.59	23.22	10.51	11.63
2016	29.67	23.22	11.24	11.66
2017	29.71	23.35	12.00	11.71
2018	29.71	23.23	12.04	11.75
2019	29.75	23.48	12.09	11.79
2020	29.65	23.48	12.56	11.79
2021	29.65	23.34	12.79	11.81

Lampiran 3. Hasil Uji Normalitas

1. Uji Histogram



2. Uji Normal P-Plot



3. Uji Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01878773
Most Extreme Differences	Absolute	.179
	Positive	.110
	Negative	-.179
Test Statistic		.179
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.827	2.537		3.873	.008		
Ln_DanaOtonomiKh usus	-.043	.116	-.070	-.371	.723	.257	3.887
Ln_BelanjaDaerah	.100	.092	.217	1.091	.317	.233	4.287
Ln_PembiayaanPerb ankanSyariah	.071	.013	.849	5.345	.002	.366	2.734

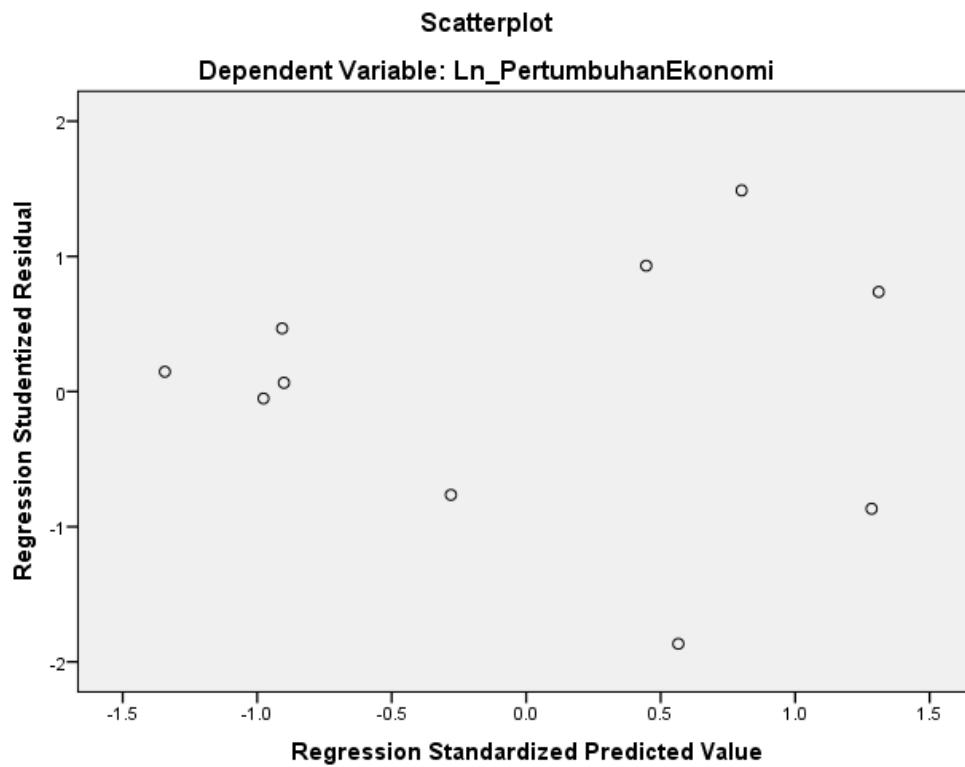
a. Dependent Variable: Ln_PertumbuhanEkonomi

Lampiran 5. Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.00148
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	5
Total Cases	10
Number of Runs	7
Z	.335
Asymp. Sig. (2-tailed)	.737

a. Median

Lampiran 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 7. Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.827	2.537		3.873	.008
	Ln_DanaOtonomiKhusus	-.043	.116	-.070	-.371	.723
	Ln_BelanjaDaerah	.100	.092	.217	1.091	.317
	Ln_PembiayaanPerbankanSyariah	.071	.013	.849	5.345	.002

a. Dependent Variable: Ln_PertumbuhanEkonomi

Lampiran 8. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.054	3	.018	34.094	.000 ^b
	Residual	.003	6	.001		
	Total	.057	9			

a. Dependent Variable: Ln_PertumbuhanEkonomi

b. Predictors: (Constant), Ln_PembiayaanPerbankanSyariah, Ln_DanaOtonomiKhusus, Ln_BelanjaDaerah

Lampiran 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.972 ^a	.945	.917	.02301

a. Predictors: (Constant), Ln_PembiayaanPerbankanSyariah, Ln_DanaOtonomiKhusus, Ln_BelanjaDaerah

b. Dependent Variable: Ln_PertumbuhanEkonomi

Lampiran 10. Hasil Regression

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	9.827	2.537		3.873	.008
	Ln_DanaOtonomiKhusus	-.043	.116	-.070	-.371	.723
	Ln_BelanjaDaerah	.100	.092	.217	1.091	.317
	Ln_PembiayaanPerbankanSyariah	.071	.013	.849	5.345	.002

a. Dependent Variable: Ln_PertumbuhanEkonomi

Lampiran 11. Tabel T

Tabel t

Df	Pr 0,25 0,5	0,1 0,2	0,05 0,1	0,025 0,05	0,01 0,02	0,005 0,01	0,001 0,002
1	1,00000	3,07768	6,31375	12,70620	31,82052	63,65674	318,30884
2	0,81650	1,88562	2,91999	4,30265	6,96456	9,92484	22,32712
3	0,76489	1,63774	2,35336	3,18245	4,54070	5,84091	10,21453
4	0,74070	1,53321	2,13185	2,77645	3,74695	4,60409	7,17318
5	0,72669	1,47588	2,01505	2,57058	3,36493	4,03214	5,89343
6	0,71756	1,43976	1,94318	2,44691	3,14267	3,70743	5,20763
7	0,71114	1,41492	1,89458	2,36462	2,99795	3,49948	4,78529
8	0,70639	1,39682	1,85955	2,30600	2,89646	3,35539	4,50079
9	0,70272	1,38303	1,83311	2,26216	2,82144	3,24984	4,29681
10	0,69981	1,37218	1,81246	2,22814	2,76377	3,16927	4,14370
11	0,69745	1,36343	1,79588	2,20099	2,71808	3,10581	4,02470
12	0,69548	1,35622	1,78229	2,17881	2,68100	3,05454	3,92963
13	0,69383	1,35017	1,77093	2,16037	2,65031	3,01228	3,85198
14	0,69242	1,34503	1,76131	2,14479	2,62449	2,97684	3,78739
15	0,69120	1,34061	1,75305	2,13145	2,60248	2,94671	3,73283
16	0,69013	1,33676	1,74588	2,11991	2,58349	2,92078	3,68615
17	0,68920	1,33338	1,73961	2,10982	2,56693	2,89823	3,64577
18	0,68836	1,33039	1,73406	2,10092	2,55238	2,87844	3,61048
19	0,68762	1,32773	1,72913	2,09302	2,53948	2,86093	3,57940
20	0,68695	1,32534	1,72472	2,08596	2,52798	2,84534	3,55181
21	0,68635	1,32319	1,72074	2,07961	2,51765	2,83136	3,52715
22	0,68581	1,32124	1,71714	2,07387	2,50832	2,81876	3,50499
23	0,68531	1,31946	1,71387	2,06866	2,49987	2,80734	3,48496
24	0,68485	1,31784	1,71088	2,06390	2,49216	2,79694	3,46678
25	0,68443	1,31635	1,70814	2,05954	2,48511	2,78744	3,45019
26	0,68404	1,31497	1,70562	2,05553	2,47863	2,77871	3,43500
27	0,68368	1,31370	1,70329	2,05183	2,47266	2,77068	3,42103
28	0,68335	1,31253	1,70113	2,04841	2,46714	2,76326	3,40816
29	0,68304	1,31143	1,69913	2,04523	2,46202	2,75639	3,39624
30	0,68276	1,31042	1,69726	2,04227	2,45726	2,75000	3,38518
31	0,68249	1,30946	1,69552	2,03951	2,45282	2,74404	3,37490
32	0,68223	1,30857	1,69389	2,03693	2,44868	2,73848	3,36531
33	0,68200	1,30774	1,69236	2,03452	2,44479	2,73328	3,35634
34	0,68177	1,30695	1,69092	2,03224	2,44115	2,72839	3,34793
35	0,68156	1,30621	1,68957	2,03011	2,43772	2,72381	3,34005

Pr	0,25	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005	0,001
df	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,002
36	0,68137	1,30551	1,68830	2,02809	2,43449	2,71948	3,33262
37	0,68118	1,30485	1,68709	2,02619	2,43145	2,71541	3,32563
38	0,68100	1,30423	1,68595	2,02439	2,42857	2,71156	3,31903
39	0,68083	1,30364	1,68488	2,02269	2,42584	2,70791	3,31279
40	0,68067	1,30308	1,68385	2,02108	2,42326	2,70446	3,30688
41	0,68052	1,30254	1,68288	2,01954	2,42080	2,70118	3,30127
42	0,68038	1,30204	1,68195	2,01808	2,41847	2,69807	3,29595
43	0,68024	1,30155	1,68107	2,01669	2,41625	2,69510	3,29089
44	0,68011	1,30109	1,68023	2,01537	2,41413	2,69228	3,28607
45	0,67998	1,30065	1,67943	2,01410	2,41212	2,68959	3,28148
46	0,67986	1,30023	1,67866	2,01290	2,41019	2,68701	3,27710
47	0,67975	1,29982	1,67793	2,01174	2,40835	2,68456	3,27291
48	0,67964	1,29944	1,67722	2,01063	2,40658	2,68220	3,26891
49	0,67953	1,29907	1,67655	2,00958	2,40489	2,67995	3,26508
50	0,67943	1,29871	1,67591	2,00856	2,40327	2,67779	3,26141
51	0,67933	1,29837	1,67528	2,00758	2,40172	2,67572	3,25789
52	0,67924	1,29805	1,67469	2,00665	2,40022	2,67373	3,25451
53	0,67915	1,29773	1,67412	2,00575	2,39879	2,67182	3,25127
54	0,67906	1,29743	1,67356	2,00488	2,39741	2,66998	3,24815
55	0,67898	1,29713	1,67303	2,00404	2,39608	2,66822	3,24515
56	0,67890	1,29685	1,67252	2,00324	2,39480	2,66651	3,24226
57	0,67882	1,29658	1,67203	2,00247	2,39357	2,66487	3,23948
58	0,67874	1,29632	1,67155	2,00172	2,39238	2,66329	3,23680
59	0,67867	1,29607	1,67109	2,00100	2,39123	2,66176	3,23421
60	0,67860	1,29582	1,67065	2,00030	2,39012	2,66028	3,23171
61	0,67853	1,29558	1,67022	1,99962	2,38905	2,65886	3,22930
62	0,67847	1,29536	1,66980	1,99897	2,38801	2,65748	3,22696
63	0,67840	1,29513	1,66940	1,99834	2,38701	2,65615	3,22471
64	0,67834	1,29492	1,66901	1,99773	2,38604	2,65485	3,22253
65	0,67828	1,29471	1,66864	1,99714	2,38510	2,65360	3,22041
66	0,67823	1,29451	1,66827	1,99656	2,38419	2,65239	3,21837
67	0,67817	1,29432	1,66792	1,99601	2,38330	2,65122	3,21639
68	0,67811	1,29413	1,66757	1,99547	2,38245	2,65008	3,21446
69	0,67806	1,29394	1,66724	1,99495	2,38161	2,64898	3,21260
70	0,67801	1,29376	1,66691	1,99444	2,38081	2,64790	3,21079
71	0,67796	1,29359	1,66660	1,99394	2,38002	2,64686	3,20903
72	0,67791	1,29342	1,66629	1,99346	2,37926	2,64585	3,20733
73	0,67787	1,29326	1,66600	1,99300	2,37852	2,64487	3,20567
74	0,67782	1,29310	1,66571	1,99254	2,37780	2,64391	3,20406
75	0,67778	1,29294	1,66543	1,99210	2,37710	2,64298	3,20249

Lampiran 12. F Tabel

Tabel F

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	161,00	199,00	216,00	225,00	230,00	234,00	237,00	239,00	241,00	242,00
2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,35	19,37	19,38	19,40
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85
12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75
13	4,67	3,81	3,41	3,18	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49	2,45
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	2,41
19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	2,42	2,38
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39	2,35
21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,49	2,42	2,37	2,32
22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,46	2,40	2,34	2,30
23	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,44	2,37	2,32	2,27
24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,36	2,30	2,25
25	4,24	3,39	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	2,28	2,24
26	4,23	3,37	2,98	2,74	2,59	2,47	2,39	2,32	2,27	2,22
27	4,21	3,35	2,96	2,73	2,57	2,46	2,37	2,31	2,25	2,20
28	4,20	3,34	2,95	2,71	2,56	2,45	2,36	2,29	2,24	2,19
29	4,18	3,33	2,93	2,70	2,55	2,43	2,35	2,28	2,22	2,18
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,33	2,27	2,21	2,16
31	4,16	3,30	2,91	2,68	2,52	2,41	2,32	2,25	2,20	2,15
32	4,15	3,29	2,90	2,67	2,51	2,40	2,31	2,24	2,19	2,14
33	4,14	3,28	2,89	2,66	2,50	2,39	2,30	2,23	2,18	2,13
34	4,13	3,28	2,88	2,65	2,49	2,38	2,29	2,23	2,17	2,12
35	4,12	3,27	2,87	2,64	2,49	2,37	2,29	2,22	2,16	2,11

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	4,11	3,26	2,87	2,63	2,48	2,36	2,28	2,21	2,15	2,11
37	4,11	3,25	2,86	2,63	2,47	2,36	2,27	2,20	2,14	2,10
38	4,10	3,24	2,85	2,62	2,46	2,35	2,26	2,19	2,14	2,09
39	4,09	3,24	2,85	2,61	2,46	2,34	2,26	2,19	2,13	2,08
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,25	2,18	2,12	2,08
41	4,08	3,23	2,83	2,60	2,44	2,33	2,24	2,17	2,12	2,07
42	4,07	3,22	2,83	2,59	2,44	2,32	2,24	2,17	2,11	2,06
43	4,07	3,21	2,82	2,59	2,43	2,32	2,23	2,16	2,11	2,06
44	4,06	3,21	2,82	2,58	2,43	2,31	2,23	2,16	2,10	2,05
45	4,06	3,20	2,81	2,58	2,42	2,31	2,22	2,15	2,10	2,05
46	4,05	3,20	2,81	2,57	2,42	2,30	2,22	2,15	2,09	2,04
47	4,05	3,20	2,80	2,57	2,41	2,30	2,21	2,14	2,09	2,04
48	4,04	3,19	2,80	2,57	2,41	2,29	2,21	2,14	2,08	2,03
49	4,04	3,19	2,79	2,56	2,40	2,29	2,20	2,13	2,08	2,03
50	4,03	3,18	2,79	2,56	2,40	2,29	2,20	2,13	2,07	2,03
51	4,03	3,18	2,79	2,55	2,40	2,28	2,20	2,13	2,07	2,02
52	4,03	3,18	2,78	2,55	2,39	2,28	2,19	2,12	2,07	2,02
53	4,02	3,17	2,78	2,55	2,39	2,28	2,19	2,12	2,06	2,01
54	4,02	3,17	2,78	2,54	2,39	2,27	2,18	2,12	2,06	2,01
55	4,02	3,16	2,77	2,54	2,38	2,27	2,18	2,11	2,06	2,01
56	4,01	3,16	2,77	2,54	2,38	2,27	2,18	2,11	2,05	2,00
57	4,01	3,16	2,77	2,53	2,38	2,26	2,18	2,11	2,05	2,00
58	4,01	3,16	2,76	2,53	2,37	2,26	2,17	2,10	2,05	2,00
59	4,00	3,15	2,76	2,53	2,37	2,26	2,17	2,10	2,04	2,00
60	4,00	3,15	2,76	2,53	2,37	2,25	2,17	2,10	2,04	1,99
61	4,00	3,15	2,76	2,52	2,37	2,25	2,16	2,09	2,04	1,99
62	4,00	3,15	2,75	2,52	2,36	2,25	2,16	2,09	2,03	1,99
63	3,99	3,14	2,75	2,52	2,36	2,25	2,16	2,09	2,03	1,98
64	3,99	3,14	2,75	2,52	2,36	2,24	2,16	2,09	2,03	1,98
65	3,99	3,14	2,75	2,51	2,36	2,24	2,15	2,08	2,03	1,98
66	3,99	3,14	2,74	2,51	2,35	2,24	2,15	2,08	2,03	1,98
67	3,98	3,13	2,74	2,51	2,35	2,24	2,15	2,08	2,02	1,98
68	3,98	3,13	2,74	2,51	2,35	2,24	2,15	2,08	2,02	1,97
69	3,98	3,13	2,74	2,50	2,35	2,23	2,15	2,08	2,02	1,97
70	3,98	3,13	2,74	2,50	2,35	2,23	2,14	2,07	2,02	1,97
71	3,98	3,13	2,73	2,50	2,34	2,23	2,14	2,07	2,01	1,97
72	3,97	3,12	2,73	2,50	2,34	2,23	2,14	2,07	2,01	1,96
73	3,97	3,12	2,73	2,50	2,34	2,23	2,14	2,07	2,01	1,96
74	3,97	3,12	2,73	2,50	2,34	2,22	2,14	2,07	2,01	1,96
75	3,97	3,12	2,73	2,49	2,34	2,22	2,13	2,06	2,01	1,96

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Khairatil Hisan
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Kota Binjei, 28 Agustus 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status Perkawinan : Belum Menikah
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat : Desa Meurandeh Aceh, Dusun Makmur,
Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa
9. Nama Orang tua/wali
 - a. Ayah : Alm. Hamdani
 - b. Ibu : Nurmaida
 - c. Alamat : Desa meurandeh Aceh, Dusun Makmur,
Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa
10. Pekerjaan Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : -
 - b. Ibu : Ibu Rumah tangga
11. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Gp. Baroh
 - b. SMP : MTs Negeri Langsa
 - c. SMA : MAN 1 Langsa
 - d. Perguruan Tinggi : IAIN Langsa

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Langsa, 22 Agustus 2022

Penulis

Khairatil Hisan